

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA TAPUNG MAKMUR
KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Siti Akodiyah

NPM : 177110136

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIA DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Siti Akodiyah
NPM : 177110136
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Turut Menyetujui:

Pekanbaru, 07 Maret 2022

Program Studi Administrasi Publik

Pembimbing


Lilis Surjani, S.Sos., M.Si


Kartius, S.Sos., M.AP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIA DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Siti Akodiyah
NPM : 177110136
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung
Keluarga Berencana (KB) di Desa Tapung Makmur
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah oleh karena itu tim penguji komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Srata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Ketua



Kartius, S.Sos., M.AP

Sekretaris



Lilis Suliani, S.Sos., M.Si

Anggota



Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0580/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Akodiyah
N P M : 177110136
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar**

Struktur Tim :

1. Kartius, S.Sos., M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Prof. Dr. H. Sufian H. , M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 Juli 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

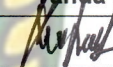


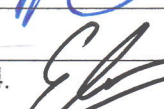
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0580/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 06 Juli 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 07 Juli 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Siti Akodiyah
NPM : 177110136
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar**

Nilai Ujian : Angka : "81.66" ; Huruf : "A -"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kartius, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. H. Sufian H. ., M.Si	Anggota	3. 
4.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 07 Juli 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Akodiyah
NPM : 177110136
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

An. Tim Penguji

Ketua



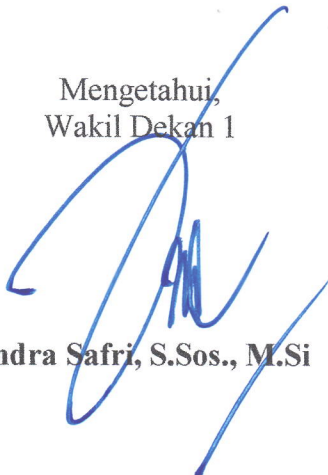
Kartius, S.Sos., M.AP

Sekretaris



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah di berikan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Usulan Penelitian ini yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”**, Ini penulis tulis dan ajukan ke Fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi sekaligus memperoleh gelar sarjana dan strata satu pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Sholawat beriringkan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran yang baik, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu.

Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syarinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menambah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Kartius, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis dalam penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang dan diri penulis.
6. Terkhusus dan sangat teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada Orang tua Ibunda tercinta

Winanti Handayani yang selalu mensertakan Doa disetiap langkah kaki anaknya dan banting tulang bercucuran keringat demi pendidikan anaknya tercinta, serta selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

7. Kepada Adik Kandung tercinta Ivha Tanaya yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Penulis juga berterima kasih kepada para sahabat Sanggra Dela, Yessi Utari, Ratna Anggara, Moretalli Br Nainggolan, Melinda Irviani, Sri Indah Wahyuni, Shindy Neffitasari dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini .
9. Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2017 kelas D atas waktu kebersamaan dan telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini

Penulis bermohon kepada yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang melimpah, Amin...

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis,
Siti Akodiyah

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Administrasi.....	16
2. Konsep Organisasi	18
3. Konsep Manajemen.....	19
4. Konsep Kebijakan Sosial	20
5. Konsep Partisipasi Masyarakat	24
6. Konsep Program Kampung Keluarga Berencana	33
B. Penelitian Terdahulu	46
C. Kerangka Pikir	48
D. Konsep Operasional	49
E. Oprasional Variabel	50
F. Teknik Pengukuran	51
BAB III : METODE PENELITIAN.....	53
A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54

C. Populasi dan Sampel	54
1. Populasi	54
2. Sampel.....	55
D. Teknik Penarikan Sampel	56
E. Sumber Data.....	56
1. Data Primer	56
2. Data Sekunder	57
F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Teknik Analisis Data.....	58
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	59
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	59
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Desa Tapung Makmur	61
1. Kondisi Geografis	61
2. Gambaran Umum Demografis	61
3. Kondisi Ekonomi	62
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	65
5. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	65
6. Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020	66
7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tapung Makmur	67
B. Gambaran Umum Kampung KB Desa Tapung Makmur.....	68
1. Profil Kampung KB Desa Tapung Makmur	68
2. Tahapan Pembentukan Kampung KB	70
3. Struktur Organisasi Kampung KB Desa Tapung Makmur	72
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Identitas Responden	73
1. Tingkat Usia	73
2. Jenis Kelamin	75
3. Tingkat Pendidikan.....	76
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	77
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan	78
a. Keputusan Awal.....	79
b. Keputusan yang Sedang Berlangsung.....	84
c. Keputusan Operasional	90
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan	94
a. Kontribusi Sumberdaya	95
b. Upaya Administrasi dan Koordinasi.....	99
c. Program Kepesertaan Kegiatan	104

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil dan Evaluasi.....	111
a. Manfaat Sosial dan Pribadi.....	111
b. Partisipasi Langsung.....	115
c. Partisipasi Tidak Langsung	119
4. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	123
C. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	125
BAB VI PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	133



DAFTAR TABEL

	Halaman
I.1 : Jumlah Penduduk Desa Tapung Makmur 2017-2020.....	7
I.2 : Perbandingan Jumlah Penduduk Dengan Angka Pernikahan dan Angka Kelahiran Bayi di Desa Tapung Makmur 2017-2020	8
I.3 : Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Dusun I Desa Tapung Makmur	9
I.4 : Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Dusun II Desa Tapung Makmur	10
I.5 : Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Dusun III Desa Tapung Makmur.....	10
I.6 : Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Dusun IV Desa Tapung Makmur	10
II.1 : Penelitian Terdahulu.....	46
II.2 : Operasional Variabel.....	50
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian	56
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian	59
IV.1 : Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin Desa Tapung Makmur Periode 2018-2020	63
V.1 : Identitas Responden Aparatur Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Berdasarkan Tingkat Usia	74
V.2 : Identitas Responden Peserta Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Berdasarkan Tingkat Usia	74
V.3 : Identitas Responden Aparatur Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin	75
V.4 : Identitas Responden Peserta Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin	75
V.5 : Identitas Responden Aparatur Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	76
V.6 : Identitas Responden Peserta Program Kampung KB	

	Desa Tapung Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	77
V.7	: Distribusi Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KBDesa Tapung Makmur Mengenai Keputusan Awal.....	79
V.8	: Distribusi Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KBDesa Tapung Makmur Mengenai Keputusan yang Sedang Berlangsung.....	84
V.9	: Distribusi Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KBDesa Tapung Makmur Mengenai Keputusan Operasional.....	90
V.10	: Distribusi Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KBDesa Tapung Makmur Mengenai Kontribusi Sumberdaya.....	95
V.11	: Distribusi Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Mengenai Upaya Administrasi dan Koordinasi..	100
V.12	: Distribusi Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Mengenai Program Kepesertaan Kegiatan	105
V.13	: Data Pencapaian Peserta KB aktif di Desa Tapung Makmur Tahun 2021.....	110
V.14	: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Mengenai Indikator Manfaat Sosial dan Pribadi	112
V.15	: Distribusi Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Mengenai Partisipasi Langsung	116
V.16	: Distribusi Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Mengenai Partisipasi Tidak Langsung	116

DAFTAR ISI GAMBAR

Halaman

II.1	: Struktur Organisasi Pengurus Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tapung Makmur.....	40
II.2	: Kerangka Pikir Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Progm Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir.....	48
IV.1	: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tapung Makmur	67
IV.2	: Struktur Pengelola Pokja Kampung Kb Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	72



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Dokumentasi Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	136
2. Daftar Kuesioner Penelitian Kepada Masyarakat Desa Tapung MakmuR.....	139
3. Daftar Wawancara Aparatur Pelaksana Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur.....	144
4. Daftar Kuesioner Aparatur Pelaksana Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur.....	148
5. Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.....	153
6. Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.....	154
7. Surat Rekomendasi Riset Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kampar.....	155
8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kepala Desa Tapung Makmur.....	156
9. Surat Keterangan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing.....	157
10. Surat Keterangan Jurnal Online.....	158
11. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skirpsi.....	159
12. Sertifikat Baca Al-Qur'an.....	160

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Akodiyah
NPM : 177110036
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir satu dan dua tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, Juni 2022

Pelaku pernyataan,


Siti Akodiyah

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA TAPUNG MAKMUR
KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Oleh

Siti Akodiyah

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Program Kampung KB, Desa Tapung Makmur

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Tipe penelitian ini menggunakan Deskriptif Kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan kuesioner ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan objektifitas keberadaan tujuan lokasi penelitian. Adapun penarikan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 50 orang, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer yang dikumpulkan dengan teknik daftar kuesioner dan wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan teknik sampling dan insidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pengambilan keputusan awal tidak terlaksana, namun dalam keputusan yang sedang berlangsung dan keputusan operasional terlaksana. Dari pelaksanaan masyarakat sudah berkontribusi sumber daya dan menjadi peserta kegiatan Kampung KB. Dan dari evaluasi langsung masyarakat masih tidak terlaksana, namun dapat terlaksana dalam evaluasi tidak langsung dengan memberikan penilaian dan saran terhadap program Kampung KB untuk perbaikan kegiatan yang akan datang. Diharapkan kepada pemerintah, instansi terkait dan lintas sektor agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi permasalahan masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas masyarakat di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Program Kampung KB agar masyarakat mempunyai rasa memiliki dan ikut andil dalam Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

**COMMUNITY PARTICIPATION IN THE KAMPUNG FAMILY
PLANNING (KB) PROGRAM IN TAPUNG MAKMUR VILLAGE,
TAPUNG HILIR DISTRICT, KAMPAR REGENCY**

ABSTRACT

*By
Siti Akodiyah*

Keywords: Community Participation, KB Village Program, Tapung Makmur Village

The purpose of this study was to determine the participation of the Family Planning Village program in Tapung Makmur Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency. This type of research uses quantitative descriptive, which prioritizes a list of questionnaires as a data collection tool and the data collected with this questionnaire is then used as the main raw material for analyzing empirical conditions and the objectivity of the existence of the research location objectives. The sampling in this study amounted to 50 people, the types and techniques of data collection used consisted of, primary data collected by questionnaires and interviews, and secondary data collected using observation and documentation. Meanwhile, the data analysis technique used is by using sampling technique and incidental sampling. The results of the study indicate that in terms of initial decision making, it is not implemented, but in ongoing decisions and operational decisions are implemented. From the implementation, the community has contributed resources and has become a participant in KB Village activities. And from the direct evaluation of the community, it is still not implemented, but it can be carried out in an indirect evaluation by providing assessments and suggestions for the Kampung KB program for improvement of future activities. It is hoped that the government, relevant agencies and across sectors can carry out activities that become community problems and help improve the quality of the community in Tapung Makmur Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency. There needs to be community involvement in the planning of the KB Village Program so that the community has a sense of ownership and takes part in the KB Village Program in Tapung Makmur Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambahan jumlah penduduk menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara khususnya di Indonesia. Permasalahan kependudukan menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks, permasalahan tersebut diantaranya pernikahan usia dini, angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang masih tinggi, dan masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk menjadi permasalahan kependudukan bisa menjadi sebuah masalah krusial yang tidak dapat dihindarkan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang terus menerus akan terjadi berbagai masalah, seperti masalah kualitas sumber daya manusia yang menurun, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, kejahatan, dan lainnya yang akan memberi dampak negatif bagi kehidupan di Indonesia khususnya.

Penduduk yang tinggi tentu bukan persoalan yang mudah dalam mengatasi persoalan kependudukan. Diperlukan usaha dan upaya yang berkelanjutan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pembuatan kebijakan dari pemerintah yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam penanganan masalah kependudukan salah satunya dengan penancangan Program Keluarga Berencana (KB).

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Kampung Keluarga Berencana (KB). Program Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah program terobosan yang didesain khusus untuk menggerakkan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat dusun alias kampung. Kampung Keluarga Berencana berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total keluarga berencana sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas, dengan dasar pelaksanaan Program Kampung KB adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB, dan Surat Kepala BKKBN Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016 Perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 474-413/V/2017 Tentang Penetapan Desa Sebagai Wilayah Kampung Keluarga Berencana Tingkat Kabupaten Kampar Tahun 2017 (SK Bupati Kampar tahun 2017). Kabupaten Kampar merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Berdasarkan data yang penulis himpun dari (Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021), dimana jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2019 adalah sebanyak 750.808 jiwa, dan pada tahun 2020 adalah sebanyak 841.332 jiwa yang tersebar ke dalam 21 Kecamatan, jumlah ini merupakan terbanyak kedua di Provinsi Riau. Dimana jumlah

penduduk dari Kecamatan Tapung Hilir sendiri pada tahun 2020 adalah sebanyak 57.769 jiwa yang tersebar ke dalam 16 desa. Sedangkan Desa Tapung Makmur pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.368 jiwa dengan rincian 1.227 orang laki-laki dan 1.141 orang perempuan, serta 544 Kepala Keluarga.

Syarat dibentuknya kampung KB pada suatu wilayah, pada dasarnya ada tiga hal pokok yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu :

1. Tersedianya data kependudukan yang akurat
2. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah
3. Adanya partisipasi aktif masyarakat.

Pembentukan Kampung KB diawali dengan penyiapan beberapa hal dibawah ini sebagai kelengkapan awal perwakilan BKKBN Provinsi setelah suatu wilayah telah ditentukan sebagai lokasi Kampung KB. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun komitmen
2. Penyusunan Profil Wilayah
3. Proses Penetapan Wilayah Sebagai Kampung KB
4. Penyediaan Data dan Informasi

Kampung Keluarga Berencana adalah satuan wilayah setingkat Rukun Warga (RW), dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, yang di dalamnya terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dari sistematis. Kampung Keluarga Berencana direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat.

Kampung Keluarga Berencana merupakan terobosan yang didesain khusus untuk menggerakkan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat dusun alias kampung. Kampung Keluarga Berencana berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total keluarga berencana sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam Kampung KB yaitu kegiatan dari lintas sektor dan kegiatan dari sisi ketahanan keluarga, seperti pembentukan serta pengembangan kelompok-kelompok kegiatan, diantaranya:

1. Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan kelompok dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta keterampilan ibu maupun anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balita yang dimiliki dalam keluarga.
2. Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program yang mengupayakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan.
3. Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan program dengan serangkaian kegiatan dilakukan untuk peningkatan pengetahuan, dan keterampilan keluarga yang lanjut usia dalam perawatan, pengasuhan serta pemberdayaan lansia.
4. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang terdiri dari berbagai segmen, seperti Keluarga Sejahtera.

5. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M) merupakan suatu wadah kegiatan program Genre dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya berperan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk serta tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi Kampung KB merupakan program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Kampung KB merupakan suatu wadah yang dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, perilaku dan cara berfikir (*mindset*) masyarakat kearah yang lebih baik. Melalui program ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan Kampung KB sebagai program prioritas di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya mengoptimalkan peran pemerintah daerah agar ikut andil dalam pelaksanaan program ini serta dapat bersentuhan langsung dan memberikan manfaat pada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. BKKBN akan bekerjasama dengan Kementerian, lembaga terkait serta organisasi lintas sektor dalam pengembangan Kampung KB ke depan.

Program Kampung Keluarga Berencana tersebut dikembangkan di setiap wilayah di Indonesia termasuk wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Tepatnya di Kabupaten Kampar telah dipilih salah satu kampung yakni Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir. Kampung Keluarga Berencana tersebut diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2017, Desa Tapung Makmur terpilih menjadi Kampung Keluarga Berencana karena terbilang kampung dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah, pemberdayaan masih minim, serta partisipasi yang rendah terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Program kampung KB ini mulanya di Desa Tapung Makmur menjadi hal yang baru di mata masyarakat, banyak yang beranggapan bahwa program kampung KB ini hanya berdampak kepada pengurangan jumlah anak. Namun demikian dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BKKBN terkait program kampung KB ini, masyarakat Desa Tapung Makmur mulai memahami dan tertarik dengan program-program kegiatan yang di canangkan. Dengan respon yang baik dari masyarakat maka program-program ini terlaksana, dengan segala macam hambatan yang dilalui terutama dari segi partisipasi masyarakat yang merupakan faktor utama keberhasilan program tersebut.

Model Kampung KB di Desa Tapung Makmur di desain menjadi model pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berwawasan kependudukan di level mikro. Karena itu, kampung KB yang berada di tingkat desa/kelurahan berfokus pada warga atau disebut dengan kampung. Fokus kampung KB pada upaya pemberdayaan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Kampar Dalam Angka Tahun 2021 diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Tapung Makmur pada tahun 2020 terdapat jumlah penduduk sebanyak 2.368 jiwa, dengan rincian 1.227 orang laki-laki dan 1.141 yang tersebar pada 4 dusun dengan 544 Kepala Keluarga. Berikut ini akan ditampilkan data mengenai jumlah penduduk Desa Tapung Makmur dan persentase tingkat pertumbuhan penduduknya mulai dari tahun 2017-2020.

Tabel I.1 : Jumlah Penduduk Desa Tapung Makmur 2017-2020

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan Penduduk Setiap Tahun
1	2017	987	976	1.963	0,91 %
2	2018	1.058	1.021	2.079	0,94 %
3	2019	1.143	1.115	2.358	0,92 %
4	2020	1.227	1.141	2.368	0,95 %

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka

Pada tabel 1.1 diatas terlihat bahwa terjadi laju pertumbuhan penduduk sebanyak lebih dari 100 orang setiap tahunnya di Desa Tapung Makmur. Pertumbuhan penduduk selain disebabkan oleh angka kelahiran bayi juga dapat dipengaruhi oleh angka kematian masyarakat dan perpindahan masyarakat dari suatu wilayah ke wilayah lain. Selain itu, masalah pertumbuhan penduduk tentu menjadi perhatian pemerintah untuk menjamin laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak mengakibatkan bonus demografi yang besar serta harus tetap di kontrol salah satunya dengan program Kampung Keluarga Berencana. Dengan tujuan agar masyarakat Desa Tapung Makmur dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan program tersebut.

Selanjutnya diperlukan perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah angka pernikahan dan angka kelahiran bayi yang terjadi di Desa Tapung

Makmur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak anggota masyarakat Desa Tapung Makmur yang melakukan pernikahan dan seberapa banyak angka kelahiran bayi di setiap tahunnya mulai tahun 2017-2020. Dari sana nanti dapat dilihat seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan program Kampung KB di Desa Tapung Makmur.

Tabel I.2 : Perbandingan Jumlah Penduduk Dengan Angka Pernikahan dan Angka Kelahiran Bayi di Desa Tapung Makmur 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Angka Pernikahan (Jumlah Pasangan)	Angka Kelahiran Bayi
1	2017	1.963	40 (naik 0,85%)	32 (naik 0,91%)
2	2018	2.079	45 (naik 1,125%)	36 (naik 1,125%)
3	2019	2.258	49 (naik 1,08%)	43 (naik 1,19%)
3	2020	2.368	39 (turun 0,79%)	32 (turun 0,74%)

Sumber: Data Olahan Penulis yang diambil dari BPS Kampar Dalam Angka

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat perbandingan antara jumlah penduduk dengan angka pernikahan dan angka kelahiran bayi di Desa Tapung Makmur pada tahun 2017-2020. Bahwasanya pada tahun 2017-2019 angka pernikahan dan angka kelahiran bayi mengalami peningkatan di setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam persentase jumlah. Hal tersebut tentu disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya penyelenggaraan Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur yang di mulai pelaksanaannya pada tahun 2017.

Berdasarkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRuSa) Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa teknik dalam mengukur tinggi, sedang atau rendahnya angka kelahiran bayi adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Angka kelahiran dapat dikatakan tinggi apabila di setiap 1000 terdapat angka kelahiran diatas 30 orang.

2. Angka kelahiran dapat dikatakan sedang apabila di setiap 1000 terdapat angka kelahiran diantara 20-30 orang.
3. Angka kelahiran dapat dikatakan rendah apabila di setiap 1000 terdapat angka kelahiran dibawah 20 orang.

Dapat disimpulkan bahwa angka kelahiran bayi di Desa Tapung Makmur masuk dalam kategori yang tinggi karena selama 4 tahun terakhir jumlah angka kelahiran bayi selalu diatas 30 orang. Oleh sebab itu program Kampung KB diharapkan dapat diikuti oleh masyarakat atau ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program tersebut.

Setelah mengetahui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, angka pernikahan serta angka kelahiran bayi di Desa Tapung Makmur mulai tahun 2017 sampai pada tahun 2020, perlu ditambahkan data mengenai tingkat partisipasi masyarakat Desa Tapung Makmur dalam mengikuti Program Kampung KB. Dimana akan disebutkan tentang jumlah masyarakat yang ikut dalam BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), Bina Keluarga Lansia (BKL). Dimana terdapat indikator seperti Target, Partisipasi, serta masyarakat yang ikut program Kampung KB yang ada pada 4 dusun yang ada di Desa Tapung Makmur.

Tabel I.3 : Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Dusun I Desa Tapung Makmur

No	Program	Target	Partisipasi	Tidak Ikut
1	BKB	24	10	14
2	BKR	46	22	24
3	BKL	15	5	10
Jumlah		85	37	48

Sumber: Rekapitulasi Data di Kampung KB Desa Tapung Makmur

Tabel I.4 : Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Dusun II Desa Tapung Makmur

No	Program	Target	Partisipasi	Tidak Ikut
1	BKB	33	16	17
2	BKR	55	23	32
3	BKL	28	12	16
Jumlah		116	51	65

Sumber: Rekapitulasi Data di Kampung KB Desa Tapung Makmur

Tabel I.5 : Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Dusun III Desa Tapung Makmur

No	Program	Target	Partisipasi	Tidak Ikut
1	BKB	64	30	34
2	BKR	118	50	68
3	BKL	47	21	26
Jumlah		229	101	128

Sumber: Rekapitulasi Data di Kampung KB Desa Tapung Makmur

Tabel I.6 : Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Dusun IV Desa Tapung Makmur

No	Program	Target	Partisipasi	Tidak Ikut
1	BKB	35	16	19
2	BKR	69	31	38
3	BKL	18	7	9
Jumlah		122	54	66

Sumber: Rekapitulasi Data di Kampung KB Desa Tapung Makmur

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tapung Makmur dalam mengikuti program ataupun kegiatan di Kampung KB tergolong rendah, mulai dari kegiatan BKB, BKR, maupun BKL yang tersebar ke dalam 4 dusun memiliki tingkat partisipasi yang rendah yakni tidak sampai setengah atau 50% dari target yang telah ditentukan.

Berdasarkan program yang telah dicanangkan oleh Kampung KB Desa Tapung Makmur diketahui bahwa program tersebut memiliki target 70% partisipasi masyarakat dari masing-masing kegiatan yaitu pada BKB, BKR,

maupun BKL yang tersebar ke dalam 4 dusun. Namun dalam prakteknya tingkat partisipasi masyarakat tidak sampai 50% dari target yang Kampung KB Desa Tapung Makmur targetkan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Kampung KB yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diketahui pada bab sasaran penggarapan bahwa sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB adalah: Keluarga; Remaja; Penduduk Lanjut Usia (Lansia); Pasangan Usia Subur (PUS); Keluarga dengan balita; Keluarga dengan remaja; Keluarga dengan lansia; Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BKB (Bina Keluarga Balita) adalah suatu upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para ibu dan anggota keluarga lain tentang bagaimana mengasuh dan mendidik anak balitanya. Melalui kegiatan program BKB diharapkan ibu-ibu, balita dan anggota keluarga lainnya dapat mengetahui tahap tumbuh kembang anak serta cara merangsangnya, sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang sebagai anak yang sehat, cerdas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian kuat dan berbudi luhur.

BKR (Bina Keluarga Remaja) merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja, baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial dan moral spiritual.

BKL (Bina Keluarga Lansia) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Tingkat partisipasi masyarakat yang merupakan target atau sasaran (target grup) dari program Kampung KB belum dapat dikatakan baik atau masih terjadi partisipasi yang kurang dari masyarakat untuk mengikuti program tersebut, sehingga sampai saat ini dari sasaran yang telah ditetapkan oleh petugas program Kampung KB selalu tidak memenuhi target berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam program Kampung KB di Desa Tapung Makmur tidak sampai separoh dari sasaran yang ditetapkan, dalam artian persentasenya dibawah 50%. Pengaruh sosialisasi yang belum maksimal dilaksanakan oleh pihak penyelenggara program Kampung KB ikut mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan tabel 1.3 sampai tabel 1.6 diatas juga terlihat bahwa dari ke 3 kelompok kegiatan kampung KB seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), bahwa yang mengikuti kegiatan Kampung KB masih sangat sedikit atau dalam arti kata bahwa partisipasi masyarakat Desa Tapung Makmur pada kelompok kegiatan kampung KB masih kurang.

Dalam sebuah program tentunya sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar agar program tersebut dapat dikatakan berhasil atau berjalan

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Partisipasi dari masyarakat juga dapat menunjukkan bagaimana suatu program dapat diterima atau tidaknya oleh masyarakat sekitar. Partisipasi sendiri menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Keberhasilan program Kampung KB tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi. Kampung KB sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya yang telah disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Adanya partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB akan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor, mensejahterakan masyarakat dan membangun masyarakat berbasis keluarga.

Adapun fenomena yang ditemukan dilapangan mengenai Program Keluarga Berencana yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini mengenai apa yang menjadi faktor rendahnya partisipasi masyarakat adalah:

1. Belum tercapainya target dari kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan program Kampung KB di Desa Tapung Makmur.

2. Masyarakat yang ikut dalam kegiatan program Kampung KB lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak ikut dalam kegiatan program Kampung KB di Desa Tapung Makmur.
3. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tapung Makmur dalam mengikuti program ataupun kegiatan di Kampung KB tergolong rendah, mulai dari kegiatan BKB, BKR, maupun BKL yang tersebar ke dalam 4 dusun memiliki tingkat partisipasi yang rendah yakni tidak sampai setengah atau 50% dari target atau sasaran yang telah ditentukan.

Mengingat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Desa Tapung Makmur dalam mengikuti program kampung KB, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah : **“Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program kampung keluarga berencana (KB) di Desa Tapung Makmur ?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam program kampung keluarga berencana (KB) di Desa Tapung Makmur.

1. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang dengan topik yang serupa atau relevan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai motivasi bagi pemerintah maupun non pemerintah dalam membangun kerjasama dalam program kampung KB.
2. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan instansi terkait maupun *stakeholder* lainnya terhadap bentuk partisipasi masyarakat dalam program kampung KB.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Secara etimologi atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris “administration”, dengan bentuk infinitifnya to administer yang diartikan sebagai to manage (mengelola). Administrasi juga dapat berasal dari bahasa Belanda “administratie”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya.

Dari pengertian tersebut, administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Arti luas administrasi sering diartikan dengan sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif (Maksudi, 2017:27).

Menurut Leonard B. White (dalam Maksudi, 2017:27) administrasi adalah suatu proses pada umumnya terdapat disetiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun kecil.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2019:4) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Kemudian menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafiie, 2019:5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan

yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) macam kategori definisi administrasi (Hardiyansyah, 2017 : 10) sebagai berikut:

- a. administrasi sebagai proses atau kegiatan. Menurut Soetarto dan Soewarno, administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.
- b. administrasi sebagai tata usaha. Harris Muda Nasution mengatakan bahwa administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis, surat-menyurat, dan mencatat (membukukan) setiap perubahan atau kejadian yang terjadi dalam organisasi itu.
- c. administrasi dalam arti pemerintah/negara/publik. Nigro dan Nigro mengemukakan bahwa kerjasama sekelompok pemerintahan bukan hanya pihak eksekutif saja. Tetapi meliputi legislatif, eksekutif, dan hubungan di antara mereka mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwasannya administrasi itu ilmu yang sangat luas untuk mengatur hubungan setiap manusia, terutama pada manusia yang memiliki tujuan untuk kehidupannya. Yang mana agar tercapainya suatu tujuan dari apa yang diinginkan mana baiknya memakai sebuah konsep administrasi. Dan dari pengertian di atas dijelaskan bahwa administrasi sebagai

proses kerjasama, dan bukan hal yang baru, karena telah ada bersamaan dengan adanya peradaban manusia.

2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka ragam elemen dan subsistem, diantara mana dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan (Winardi, 2011 : 15)

Organisasi menurut Siagian (dalam Tarmizi dan Hendri Andry, 2015: 14) adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama serata formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan nama terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam Maksudi, 2017:38) organisasi adalah sebagian kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Kemudian, menurut Hasibuan (2007:05) organisasi adalah suatu system perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu atau lebih dikenal dengan tingkatan manajemen dalam organisasi terdiri dari top manajemen, leader manajemen, dan lower manajemen.

Jadi dapat disimpulkan, organisasi selain dipandang sebagai wadah atau tempat kegiatan, organisasi juga dapat dipandang sebagai suatu proses, terfokus pada interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi didalamnya.

Keberhasilan dalam suatu organisasi ditentukan oleh sumber daya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan dengan cara salah satunya bekerjasama atau berkoordinasi dengan organisasi lain untuk mencapai suatu tujuan secara keseluruhan, hal ini juga dapat mewujudkan organisasi yang baik.

3. Konsep Manajemen

Menurut G. R. Terry (dalam Indra dan Sufian, 2013 : 40) “Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula”

Menurut Winardi (2010 : 76) mengemukakan manajemen sebagai berikut: “Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (actuating), dan tindakan pengawas (controlling), yang dilaksanakan untuk menderterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.”

Menurut Syafri (2012 : 2) hakikatnya manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain:

“manajemen merupakan rangkaian aktifitas menggerakkan kelompok orang organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen. Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektifitas dan efisiensi.”

Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan (Siswanto, 2013 : 2)

Menurut Suswanto dan Doni (2014 : 16) manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien.

Menurut Hasibuan (2014 : 1) manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar-dasar manajemen yaitu:

- a. Adanya kerja sama antar kelompok orang dalam ikatan formal
- b. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai
- c. Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur
- d. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan

Dari definisi diatas, manajemen merupakan salah satu rangkaian proses yang sangat penting dalam melaksanakan rutinitas kehidupan dalam berorganisasi. Karena manajemen merupakan sebuah proses dengan tujuan mengatur aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau sekelompok orang dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

4. Konsep Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna yakni kata kebijakan dan kata sosial Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari

kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan sosial juga adalah ketetapan yang dirancang secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi kuratif) yang mempromosikan (fungsi pengembangan sebagai wujud kewajiban negara (state obligatiaon) dalam memenuhi hak warga negaranya (Amri Marzali, 2012:20). Dalam hal lainnya kebijakan sosial dapat di katakan sebagai sebuah aspek sosial yaitu sesuatu yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial adalah prinsip-prinsip, prosedur dan tata cara dari undang-undang yang telah ada, sebagai panduan administrasi dan regulasi pada lembaga yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial (Sholichin Abdul Wahab, 2008:5-7) maka kata sosial dapat diartikan baik secara genetik atau luas maupun spesifik. Secara generik kata sosial menunjukkan pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektifitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup antara lain bidang pendidikan, kesehatan politik, hukum budaya atau pertanian. Dalam arti spesifik kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia terutama mereka yang dikategorikan sebagai kelompok rentan. Kata sosial ini menyangkut program dan pelayanan sosial untuk mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan ketidak fungsi fisik dan psikis, tuna sosial, kenakalan remaja dan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini istilah kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian spesifik yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Pengertian kebijakan sosial ini selaras dengan pengertian perencanaan sosial yang dikemukakan oleh conyers (dalam Arifin Tahin, 2011:38), bahwa perencanaan sosial adalah perencanaan perundang-undangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial yang pertama kali muncul di Eropa barat dan Amerika utara. Pengertian perencanaan sosial diintegrasikan secara meluas, di masyarakat barat berkembang anggapan bahwa perencanaan sosial senantiasa berkaitan erat dengan perencanaan kesejahteraan sosial.

Beberapa pendapat lain tentang kebijakan sosial:

- a. Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (Rein, 1970).
- b. Kebijakan sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya sosial peningkatan pemerataan dan pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial (Rein, 1970).
- c. Kebijakan sosial adalah strategi tindakan-tindakan atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Hutman 1981).
- d. Kebijakan sosial kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan (welfare), baik dalam yang meluas, maupun dalam arti sempit, yang merujuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan koleksi tertentu

kaitannya koleksi tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat (Spiker 1995).

- e. Kebijakan sosial adalah studi mengenai peranan negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan rakyat (Hill.1996).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan untuk mengangani permasalahan sosial dan dalam pemenuhan kebutuhan sosial bagi masyarakat.

Kata sosial yang mendefenisikan oleh para ahli tersebut, menunjukkan pada manfaat-manfaat TU bantuan-bantuan kesejahteraan sosial (*sosial walfare bane- fits*). Manfaat dan bantuan kesejahteraan sosial yang mencakup dalam pengertian ini antara lain meliputi : perlindungan sosial (*social assistance*) maupun asuransi sosial (*social insurance*): program pemeliharaan penghasilan: rehabilitasi sosial para penderita cacat ,eks narapidana ,wanita atau pria tuansila ,atau eks penderita penyakit kronis perawatan kesehatan mental ;pendidikan dan pelatihan bagi pengguran,pelayan bagi manusia yang berusia lanjut perawatan dan perlindungan anak; konseling perkawinan; dan keluarga; serta pelayanan rekreasi dan pengisian waktu luang.

Kebijakan sosial di negara-negara barat sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini dikarenakan sebagian besar dana untuk kebijakan sosial dihimpun dari masyarakat (publik) melalui pajak. seperti negara-negara skandinavia di-antaranya Denmark, swedia ,dan norwegia serta negara-negara eropa barat seperti belanda jerman inggris dan prancis pelayanan-pelayanan sosial menjadi bagian integral dari system negara kesejahteraan (*Walfare state*)

yang berfungsi dalam memenuhi kebutuhan dasar dibidang medik untuk segala kelompok usia (anak-anak, remaja ,lanjut usia dan status sosial ekonomi (orang kaya atau miskin).

Para analis kebijakan dan kelompok pemikir yang independen kemudian muncul sebagai profesi baru yang banyak berperan mengkritisi beroperasinya kebijakan sosial dan kemudian mengajukan saran-saran perbaikannya demi terwujudnya *good governance* sejalan dengan menguatnya semangat demokratisasi, *civil society* dan transparansi.

5. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara umum diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Verhangen (Mardikanto dan Poerwoko, 2015) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggungjawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

1. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki;
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri;
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan;
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bryant dan White (Muluk, 2007) telah menggambarkan pengertian partisipasi yang mendalam pada bidang administrasi pembangunan sebagai partisipasi oleh masyarakat atau penerima manfaat suatu proyek dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian Bryant dan White menguraikan kandungan makna dalam pengertian partisipasi ini bahwa partisipasi merupakan sebuah sikap yang terbuka terhadap persepsi maupun ide, memberikan perhatian yang mendalam mengenai hasil dari suatu proyek yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, dan memiliki kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan pihak lain terhadap suatu kegiatan.

Partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program akan mengembangkan kemandirian pada masyarakat demi kemajuan pembangunan. Selain itu, penerimaan manfaat merupakan pelengkap dari cakupan pada proses perencanaan dan pelaksanaan sehingga akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Griesgraber dan Gunter (Muluk, 2007) mengartikan partisipasi sebagai “mekanisme untuk memungkinkan orang-orang yang terkena dampak untuk berbagi dalam pembuatan proyek atau program, dimulai dengan identifikasi semua jalan sampai ke implementasi dan evaluasi”. Sedangkan partisipasi

menurut Webster (Arzaq dan Tauran, 2015) merupakan tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan yang dimaksud memperoleh manfaat. Dengan demikian, konsep partisipasi menjadi semakin luas mulai dari aspek perencanaan, implementasi, evaluasi, sampai penerimaan manfaat.

Partisipasi menurut Isbandi (2007:27) merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dedi Mulyadi (Igrisia, 2008) menjelaskan dua makna partisipasi, yaitu partisipasi instrumental dan partisipasi transformasional. Partisipasi disebut instrumental ketika dipandang sebagai cara untuk mencapai sasaran tertentu untuk proyek pembangunan, partisipasi transformasional jika dilihat dari cara atau sarana yang bertujuan memberdayakan masyarakat. Dalam partisipasi instrumental, inisiatif pelaksanaan proyek atau aktifitas misalnya datang dari pihak luar, sedangkan masyarakat ikut dalam bentuk kemitraan, tujuan pelaksanaan proyek tersebut ialah kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan, dan tujuan partisipasi masyarakat didalamnya ialah pencapaian saran-saran proyek tersebut secara efektif dan efisien. Asumsi partisipasi semacam ini ialah bahwa para perencana lebih tahu apa yang terbaik bagi masyarakat, dan masyarakat tinggal melaksanakannya secara bersama-sama serta menikmati hasilnya. Dengan kata lain proses pengambilan kebijakan berlangsung dari ke atas ke bawah (*top down*).

Partisipasi transformasi masyarakat terlibat sebanyak mungkin dalam pelaksanaan suatu proyek atau aktifitas, mulai tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Suatu proyek atau aktifitas merupakan pencerminan kehendak masyarakat, dan proses pengambilan kebijakan berlangsung dari bawah ke atas (*bottom up*). Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran suatu proyek sebagian besar bergantung pada masyarakat sendiri. Dengan demikian, selain memiliki kemampuan dan kemandirian yang semakin tinggi, masyarakat akan memiliki tanggungjawab lebih besar. Dalam partisipasi semacam itu, masyarakat diandaikan lebih tahu apa yang terbaik bagi diri mereka. Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam partisipasi transformasional tersebut, maka partisipasi bisa dipahami sebagai proses sekaligus cara bagi para *stakeholders* dalam mempengaruhi dan berbagi peran atas perkara pembangunan, proses pengambilan kebijakan dan sumberdaya yang dimaksud dengan para *stakeholders* yang dimaksud adalah masyarakat umum.

Partisipasi masyarakat menurut Sumardi (Andreeyan, 2014) berarti “peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan dalam bentuk memberikan pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, hal ini dapat berupa memberi masukan pikiran, tenaga, keahlian, waktu, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.”

Yadav (Kristiniati dan Choiriyah, 2014) menambahkan adanya empat partisipasi yang menunjuk dalam kegiatan pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil

pembangunan. Sedangkan menurut Mubyarto (Putri, 2010) partisipasi masyarakat yaitu suatu komitmen dalam membantu keberhasilan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan sendiri.

Partisipasi dibutuhkan agar sinergitas antara pemerintah dan masyarakat terjalin dengan baik dalam pencapaian tujuan kebijakan. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kepedulian dan kesadaran serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya program dari pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.

Dusseldorp (Mardikanto dan Poerwoko, 2015) mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat, yakni :

1. Menjadi anggota dalam kelompok-kelompok masyarakat;
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat;
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Sulaiman (Paath, 2013) membagi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menjadi lima, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
2. Partisipasi langsung dalam kegiatan secara fisik dan tatap muka.

3. Partisipasi representatif yaitu dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil dalam organisasi atau panitia.
4. Partisipasi dalam bentuk dukungan dapat berupa keterlibatan mental, emosional individu dan motivasi untuk memberikan kontribusi tergerak dalam bentuk buah pikiran, tenaga, barang dan jasa yang merupakan hak dasar yang sah bagi setiap individu dalam kesediaanya untuk turut serta menentukan keberhasilan suatu program pembangunan.
5. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yaitu memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61) membagi partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu partisipasi yang berkaitan tentang pemberian gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Ada tiga jenis keputusan:
 - a. Keputusan Awal (*Initial Decisions*), keputusan awal diawali dengan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada pada masyarakat kemudian diberikan suatu solusi atas permasalahan tersebut. Keputusan awal ini mencakup pada gagasan, formulasi, perumusan rencana dan lainnya dalam menunjang pelaksanaan suatu program.
 - b. Keputusan yang sedang Berlangsung (*On going Decisions*), keputusan yang sedang berlangsung terjadi setelah keputusan awal telah dibuat. Ada kemungkinan bahwa penduduk setempat yang tidak berpartisipasi dalam keputusan awal mungkin akan diminta

berpartisipasi dalam keputusan yang sedang berlangsung begitu proyek telah tiba di wilayah tersebut. Partisipasi dalam keputusan yang sedang berlangsung untuk mengetahui kebutuhan dan prioritas baru yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- c. **Keputusan Operasional** (*Operational Decisions*), keputusan operasional terkait dengan organisasi yang dibentuk berperan untuk melibatkan masyarakat dalam pencapaian suatu program. Partisipasi ini berkaitan dengan hal-hal seperti komposisi keanggotaan, prosedur rapat, pemilihan kepemimpinan dan lainnya.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam aspek implementasi dalam tiga cara utama yaitu kontribusi sumber daya, upaya administrasi dan koordinasi dan program kepesertaan.
 - a. **Kontribusi Sumber Daya** (*Resource Contributions*) ada berbagai bentuk, seperti penyediaan tenaga kerja, uang, barang material, dan informasi. Semua input tersebut sangat penting untuk sebuah program pembangunan. Melalui partisipasi tersebut, masyarakat setempat dapat berkontribusi tenaga kerja untuk melakukan kegiatan fisik, menyumbangkan alat untuk kegiatan atau memberikan informasi penting tentang topik seperti hasil dari program atau masalah yang dihadapi dan sebagainya.
 - b. **Upaya Administrasi dan koordinasi** (*Administration and co-ordination efforts*) adalah cara kedua masyarakat dapat terlibat dalam

implementasi proyek. Disini mereka dapat berpartisipasi sebagai lokal dipekerjakan karyawan atau sebagai anggota atau pengambil keputusan proyek. Mereka juga dapat menjadi anggota asosiasi sukarela yang memainkan peran dalam mengoordinasi kegiatan mereka dengan proyek tersebut.

c. Program Kepesertaan Kegiatan (*Programme Enlistment Activities*) merupakan bentuk partisipasi implementasi yang paling umum. Menjadi peserta dalam program sangat penting untuk melihat manfaat yang disediakan, karena pendaftaran tidak selalu menjamin manfaat.

- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dapat dilihat dari tiga macam manfaat yaitu materi, sosial dan pribadi. Manfaat material pada dasarnya adalah barang pribadi yang menghasilkan dari suatu proyek. Manfaat sosial pada dasarnya adalah barang publik. Manfaat ini biasanya dicirikan sebagai layanan atau fasilitas seperti sekolah, klinik kesehatan dan jalan yang baik. Manfaat pribadi bukan berarti manfaat secara individu, keuntungan pribadi dalam hal ini seperti kepada anggota kelompok atau sektor karena ini memperoleh kekuatan sosial dan politik yang lebih banyak melalui pengoperasian proyek.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi, yaitu mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap ini sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan program ataupun kegiatan selanjutnya. Terdapat dua tipe partisipasi dalam evaluasi program yaitu dengan partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.

- a. Partisipasi Langsung, dalam suatu proyek orang-orang lokal atau pemimpin lokal dapat berpartisipasi. Pegawai pemerintah dapat berpartisipasi dalam tinjauan anggaran tahunan yang memenuhi fungsi evaluatif tertentu, tetapi pejabat tingkat lokal umumnya tidak terlibat. Sangat mungkin bahwa apapun upaya dan keterlibatan lokal dalam evaluasi program akan terjadi melalui kegiatan politik atau sejenisnya.
- b. Partisipasi tidak Langsung, adalah partisipasi dalam kegiatan evaluatif yang bertujuan untuk mengupayakan memberikan pendapat yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari sebuah program untuk menyarankan beberapa perbaikan.

Slamet (Mardikanto dan Poerwoko, 2015) berpendapat bahwa ada tiga unsur pokok yang sangat menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi;
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi;
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Goldsmith dan Blustain (Anwar, 2009) dalam penelitiannya di Jamaica memberikan kesimpulan bahwa masyarakat akan berpartisipasi jika : partisipasi akan dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau telah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan, partisipasi itu dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, manfaat yang diperoleh dalam partisipasi tersebut dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat, dan

dalam proses partisipasi itu masyarakat terjamin dapat melakukan kontrol. Partisipasi masyarakat ternyata dapat berkurang jika mereka tidak ataupun kurang berperan dalam proses pengambilan keputusan.

6. Konsep Program Kampung Keluarga Berencana

Amanat Presiden Republik Indonesia, kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan atau sebuah program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019. Kampung KB mencoba memadukan konsep pembangunan terpadu bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program tersebut dapat bersentuhan secara langsung dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). (BKKBN, 2017).

Kampung KB merupakan program nasional dengan inovasi yang berawal dari Lorong KB yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar. Lorong KB merupakan program Badan Keluarga Berencana (KB) Kota Makassar yang menjadi program percontohan nasional. Pada tanggal 14 Januari 2016, Presiden RI telah mencanangkan Kampung KB di Dusun Jenawi Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupten Cirebon. Untuk pelaksanaannya, maka BKKBN akan bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait serta organisasi lintas sektoral untuk pengembangan Kampung KB.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program

kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. (BKKBN, 2015). Dibentuknya program kampung KB memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta pembangunan lintas sektor untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

Adapun tujuan dari Kampung KB dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1. Tujuan Umum

Secara umum, Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan lintas sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam mendampingi dan membina serta memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan program KKBPK dan pembangunan lintas sektor terkait, memberikan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja, meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok (Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung, meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih, meningkatkan kualitas keimanan para remaja atau mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah atau ceramah keagamaan) di kelompok remaja, dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja atau mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok pelajar dan seterusnya.

Pemilihan dan penentuan wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB, memiliki tiga kriteria yang akan dipakai :

1. Kriteria utama : yang mencakup dua hal:
 - a. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa atau kelurahan di kampung tersebut.
 - b. Jumlah peserta KB berada di bawah rata-rata dalam pencapaian peserta KB tingkat desa atau kelurahan di lokasi kampung KB tersebut.
2. Kriteria wilayah: mencakup 10 kategori wilayah yang dapat memilih salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut: (1) Wilayah Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Wilayah terpencil, (6) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, dan (10) Padat Penduduk.
3. Kriteria Khusus : kriteria yang mencakup 5 hal, yaitu :
 - a. Kriteria data meliputi data dan peta keluarga yang dimiliki setiap RT/RW;

- b. Kriteria kependudukan meliputi angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah;
- c. Kriteria program KB meliputi peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari pencapaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan serta tingkat *unmet need* lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa atau kelurahan;
- d. Kriteria program pembangunan keluarga meliputi partisipasi keluarga dalam membina ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R yang masih rendah;
- e. Kriteria program pembangunan lintas sektor yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang pemukiman dan lingkungan, dan program lainnya yang bisa ditambah sesuai dengan kondisi dan perkembangan di suatu wilayah kampung KB.

Sasaran kegiatan merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB, yaitu keluarga, remaja, Penduduk Lanjut Usia (Lansia), Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja serta keluarga yang memiliki lansia, dan sasaran sektor sesuai dengan tugas di masing-masing bidang. Pelaksananya adalah Kepala Desa atau Lurah, Ketua RW, Ketua RT, Penyuluh KB, Petugas lapangan sektor terkait, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub

PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Kampung KB, yaitu:

1. Kependudukan.
2. Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga (pembangunan keluarga).
4. Kegiatan lintas sektor (bidang kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan lainnya sesuai kebutuhan wilayah Kampung KB).

Tujuan Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya. Adapun sasaran dari Kampung KB adalah:

1. Sasaran Langsung (Keluarga, Pasangan usia subur, Masyarakat, Balita, Remaja, Lansia).
2. Sasaran Tidak Langsung (Tokoh-tokoh masyarakat, Organisasi Masyarakat, petugas lapangan dan provider).

Prinsip-prinsip pembentukan Kampung KB adalah sebagai berikut:

1. Kampung KB merupakan istilah yang baku (tidak diganti dengan istilah yang lain);
2. Membina dan meningkatkan kesertaan ber-KB;
3. Dibentuk untuk memantapkan 8 fungsi keluarga;

4. Pelayanan yang diberikan terintegrasi antara program KKBPK dengan lintas sektor terkait;
5. Merupakan gerakan yang diprakarsai masyarakat;
6. Tidak bermuatah politis didalamnya.

Dalam proses pembentukannya, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan prasyarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah, komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB dan bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat. Maksudnya adalah data yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa dan data catatan sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.
3. Partisipasi Masyarakat. Dukungan partisipasti aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di

Kampung KB secara berkesinambungan merupakan prasyarat pembentukan Kampung KB guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya. Selain itu keterlibatan pihak swasta dalam penggarapan program Pembangunan di Kampung KB sangat penting sebagai bentuk gotong royong dari semua pihak.

Sebelum pembentukan, harus dilakukan pendataan dan pemetaan potensi wilayah, yang mencakup:

1. Potensi sebagai pengelola (PPKBD, Sub-PPKBD, Paguyuban dan tokoh-tokoh masyarakat);
2. Potensi kegiatan (Poktan Tribina, Poktan Kegiatan sektor lainnya yang ada di kampung);
3. Potensi pelayanan (Posyandu, Polindes, Bidan Praktek).

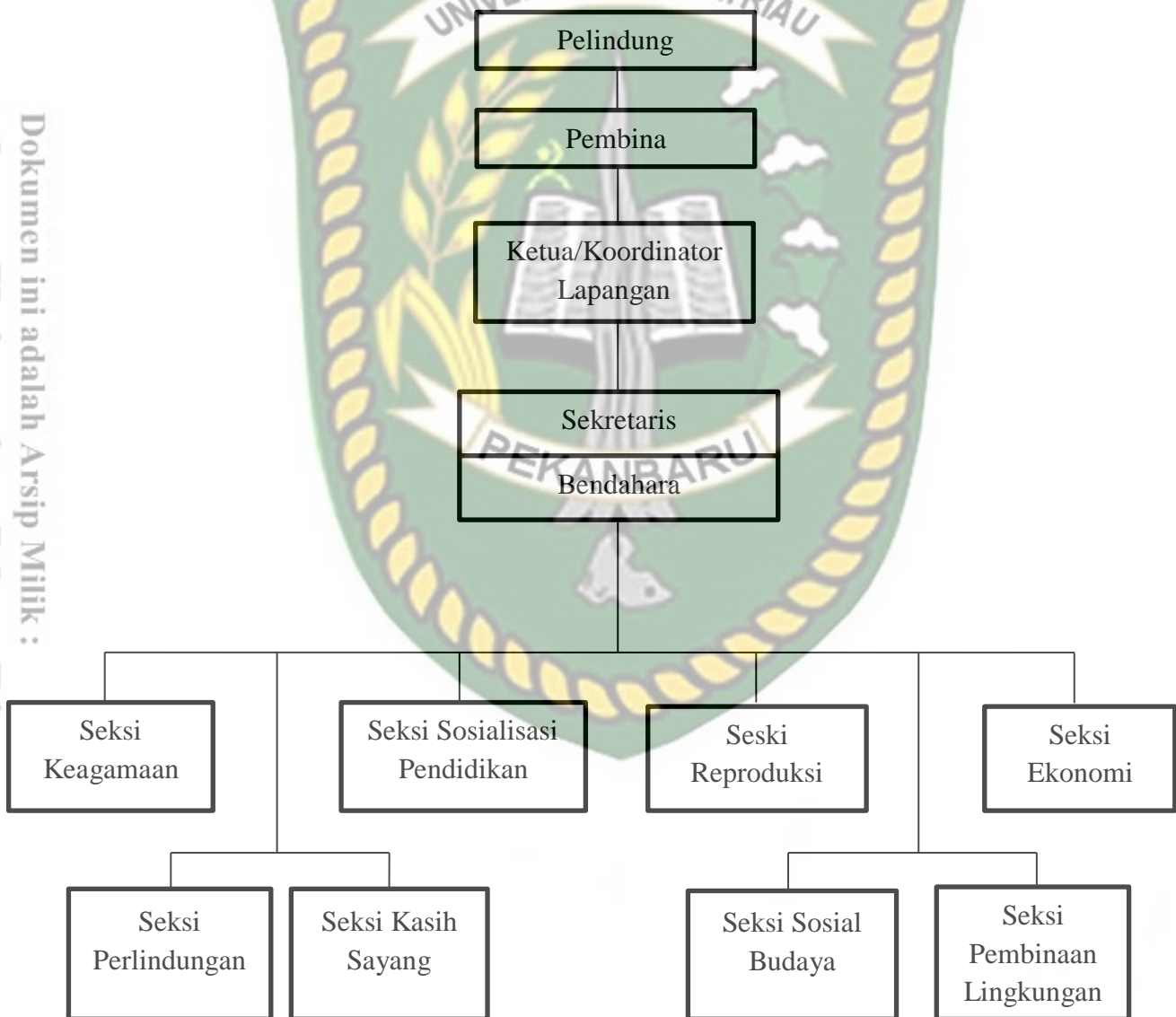
Untuk mengelola Kampung KB perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) atau Pengurus Kampung KB yang disepakati bersama. Pembentukan Pokja/Pengurus Kampung KB bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing, namun tujuannya tetap mengacu pada pelaksanaan 8 fungsi keluarga.

Adapun susunan pengurus Kampung KB adalah sebagai berikut:

- a. Pelindung : Kepala Desa/Lurah
- b. Penasehat : BPD, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, PB, PPKBD/Pos KB.
- c. Ketua : Kepala Dusun/ Ketua RW / Tokoh Masyarakat
- d. Sekretaris : Sub-PPKBD/Sub-Pos KB

- e. Bendahara : Pengurus PKK RW
- f. Seksi-seksi : seksi keagamaan, seksi sosialisasi/pendidikan, seksi reproduksi, seksi ekonomi, seksi perlindungan, seksi kasih sayang, seksi sosial budaya, dan seksi pembinaan lingkungan.

Bagan II.2 : Struktur Organisasi Pengurus Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Desa Tapung Makmur



Sumber: Profil Kampung KB Desa Tapung Makmur

Setelah dibentuk Pokja Kampung KB, maka dilakukan musyawarah warga kampung untuk menyepakati pembentukan Kampung KB. Setelah warga RW/Dusun menyepakati pembentukan Kampung KB, maka Ketua/Pengurus Pokja Kampung KB mengusulkan kepada Desa/Lurah/Camat untuk mencanangkan dan mengukuhkan terbentuknya Kampung KB. Pencanaan Kampung KB dapat dilakukan dengan memanfaatkan momentum atau kegiatan strategi yang ada di daerah, yang penting dapat diketahui dan disaksikan oleh warga kampung.

Kegiatan rutin Kampung KB dilaksanakan secara terus menerus oleh pengurus Pokja Kampung KB termasuk seksi-seksi dan keluarga terhadap program KKBKP dan lintas sektor terkait melalui penerapan 8 fungsi keluarga. Diharapkan dengan adanya Kampung KB, keluarga semakin meningkat kesejahteraannya dan tidak terdapat lagi keluarga miskin di Kampung KB. Miskin tidak hanya kekurangan ekonomi tapi terhindar dari segala bentuk kemiskinan diantaranya : miskin harta, miskin ibadah, miskin sosial, terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan.

Adapun peranan/fungsi pengurus Kampung KB adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab
 - a. Bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pembentukan pengembangan dan operasional Kampung KB;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan Kampung KB dengan sektor terkait;
 - c. Mengusahakan anggaran dari dana desa serta pihak luar untuk keperluan Kampung KB.

2. Penasehat
 - a. Memberikan masukan baik kepada penanggung jawab maupun pelaksana dalam membina mengembangkan Kampung KB;
 - b. Mengadvokasi pihak-pihak yang terkait dengan Program dan Kegiatan Kampung KB.
3. Ketua Pokja
 - a. Menentukan kebijakan dan strategi program kegiatan Kampung KB;
 - b. Membina dan membimbing seluruh pengurus Pokja;
 - c. Melakukan koordinasi dengan semua pihak.
4. Sekretaris
 - a. Melakukan tata laksana administrasi Kampung KB;
 - b. Menerima dan mengolah laporan pelaksanaan Kampung KB;
 - c. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung KB.
5. Bendahara

Menerima, membayarkan, mencatat, melaporkan dan mempertanggung jawabkan semua aktifitas keuangan Kampung KB.

Pencatatan dan pelaporan di Kampung KB pada prinsipnya mengikuti dua

pola, yaitu:

1. Pencatatan dan pelaporan di yang telah baku sesuai dengan aturan program dari tingkat yang lebih atas dari masing-masing instansi pemerintahan/lembaga, misalnya laporan program KKBPK, Laporan Posyandu, laporan organisasi lainnya.

2. Pencatatan dan pelaporan khusus di Kampung KB dilaksanakan melalui tahap sebagai berikut:
- a. Dari seksi-seksi pengurus kampung KB ke ketua Kampung KB dilaksanakan setiap bulan;
 - b. Dari Kampung KB ke tingkat Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah) dilaksanakan setiap bulan;
 - c. Dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah) ke tingkat kecamatan (Camat) dilaksanakan setiap bulan, dengan tembusan kepada Kepala UPTD masing-masing instansi terkait;
 - d. Dari Kecamatan (Camat) ke Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) dilaksanakan setiap tiga bulan dengan tembusan OPD Kabupaten/Kota terkait;
 - e. Dari Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) ke Provinsi (Gubernur) dilaksanakan setiap tiga bulan dengan tembusan OPD Provinsi terkait;
 - f. Dari Provinsi (Gubernur) ke BKKBN dilaksanakan tiga bulan sekali dengan tembusan kepada masing-masing instansi/ Kementerian/ Lembaga.
 - g. Dari BKKBN kepada Presiden melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dilaksanakan tiga bulan sekali dengan tembusan kepada masing-masing Intansi/ Kementerian/ Lembaga.

Prinsip pembiayaan Kampung KB diutamakan adalah menumbuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. oleh karena itu prinsip pembiayaan

Kampung KB adalah dari oleh dan untuk warga Kampung KB itu sendiri. namun demikian, mengingat keterbatasan kemampuan warga masyarakat yang ada di Kampung KB, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan Kampung KB melalui sumber-sumber yang legal. Adapun sumber-sumber pembiayaan Kampung KB adalah sebagai berikut:

1. Iuran warga Kampung KB
2. APBDDesa/Kelurahan
3. APBD Provinsi
4. APBD Kabupaten/Kota
5. Alokasi Dana Desa
6. Dana Desa
7. Kemitraan/CSR (*Coorporation Social Responcibility*) yaitu iuran atau kepedulian dari perusahaan untuk pembangunan.
8. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Dalam menilai keberhasilan suatu program maka dibutuhkan sebuah indikator untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu program Kampung KB juga telah menetapkan suatu indikator keberhasilannya, adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

A. Indikator Input

1. Tingginya partisipasi seluruh potensi Kampung untuk kemajuan Kampung KB.
2. Beragamnya kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu baik program pemerintah maupun inovasi masyarakat.

3. Besarnya sumber anggaran Kampung KB yang di dapat dari iuran masyarakat, bantuan pemerintah maupun donatur yang tidak mengikat.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana.

B. Indikator Proses

1. Berjalannya kegiatan di masing-masing seksi.
2. Peran serta petugas pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan.
3. Peran serta institusi masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB.
4. Menjalankan 8 fungsi keluarga yang dilaksanakan di setiap keluarga.
5. Frekuensi dan kualitas kegiatan KIE/Penyuluhan.
6. Frekuensi pelayanan KP-KR.
7. Frekuensi pelayanan dari sektor lainnya.
8. Frekuensi pertemuan berkala kelompok-kelompok kegiatan (baik program KKBPk maupun kegiatan sektor terkait di Kampung KB).
9. Frekuensi kegiatan gerakan masyarakat Kampung KB.

C. Indikator Output

Keberhasilan kampung KB dapat diukur dari pelaksanaan 8 fungsi di masing-masing keluarga, yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan keagamaan (keluarga semakin rajib beribadah).
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat baik ilmu pengetahuan maupun profesionalisme (semakin banyak orang yang memiliki keterampilan untuk meningkatkan usaha).

3. Tercapainya rata-rata dua anak setiap keluarga, keluarga sehat, anak tumbuh dan berkembang dengan baik.
4. Meningkatnya *income* per kapita keluarga dan pemanfaatannya menunjang kepentingan keluarga.
5. Terlindunginya masyarakat/keluarga dan hidup tenang dan nyaman.
6. Semakin terjalinnya hubungan harmonis antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
7. Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung.
8. Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antar perilaku dan lingkungan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Indikator	Hasil Penelitian
1	Joko Adi Prasetyo	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera di Kampung KB	Interaksi Simbolik	Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan partisipasi masyarakat terhadap program-program yang diadakan dalam Kampung KB sangatlah baik karena masyarakat menerima dan turut ikut andil dalam menjalankan semua program kegiatan tersebut, karena memang dari adanya program tersebut masyarakat juga ikut memperoleh dampak yang baik dan bermanfaat baik untuk individu ataupun untuk desa, meskipun masih ada juga yang merasakan dampaknya tapi secara tidak langsung, tapi semua program yang ada di Kampung KB mengalami peningkatan dan perbaikan setiap tahunnya.

No	Nama	Judul	Indikator	Hasil Penelitian
2	Relidiansyah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir	Partisipasi masyarakat	Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program kampung keluarga berencana (KB) di Desa Tanjung Seteko adalah rendah yaitu dibawah 50% yang ditunjukkan dari hasil uji hipotesis menggunakan rumus uji dua pihak atau uji T dengan taraf signifikan 0,05 yaitu 0,31.
3	Rifian Handi	Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Tanjung Belit Selatan	Komunikasi ,Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi	Berdasarkan semua hasil dari penelitian yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua indikator dari sudah berjalan dengan sangat baik terkait pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, hanya saja masih terdapat masalah pada indikator Disposisi yaitu sikap yang mana diberikan oleh para kader Kampung Keluarga Berencana yang dinilai kurang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, hal ini bila dibiarkan terus menerus maka nantinya bisa menjadi penghambat keberhasilan Program Kampung Keluarga Berencana.

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

C. Kerangka Pikir

Gambar II.2 : Kerangka Pikir Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tapung Makmur



Sumber: Olahan Penulis, 2021

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan serta menghindari kesalahan dalam menganalisa data dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membuat konsep operasional yang nantinya dapat digunakan pembaca agar lebih mudah dalam memahami maksud dari tujuan penulis, yaitu diantaranya :

1. Partisipasi menurut Isbandi (2007:27) merupakan keikut sertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, mengambil keputusan dan memilih alternatif sebagai solusi dalam penanganan masalah, melaksanakan alternatif yang dipilih, dan melibatkan masyarakat dalam proses perubahan yang terjadi.
2. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa.
3. Keluarga Berencana adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara
4. Kampung Keluarga Berencana adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
5. Desa Tapung Makmur adalah salah satu desa yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program kampung KB di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Operasional Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Program

Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tapung Makmur Kecamatan

Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)	Item (5)	Ukuran Skala (6)
Partisipasi menurut Isbandi (2007:27) merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.	Partisipasi Masyarakat (Cohen dan Uphoff di dalam Dwiningrum, 2011 :61)	1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan	1. Keputusan awal	Gagasan Rencana Kegiatan Perumusan rencana	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
			2. Keputusan yang sedang berlangsung	Kebutuhan Prioritas Kegiatan	
			3. Keputusan operasional	Komposisi keanggotaan Prosedur rapat Pemilihan kepemimpinan	
		2. Partisipasi dalam pelaksanaan	1. Kontribusi Sumberdaya	Penyediaan tenaga kerja Anggaran Informasi	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
			2. Upaya administrasi dan koordinasi	Karyawan/Anggota Pengambil keputusan	
			3. Program kepesertaan kegiatan	Manfaat kegiatan Sasaran kegiatan	
		3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi	1. Manfaat Sosial dan Pribadi	Fasilitas dan keuntungan pribadi	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
			2. Partisipasi langsung	Masyarakat lokal Pemimpin lokal	
			3. Partisipasi tidak langsung	Pendapat masyarakat Pendapat tokoh	

Sumber: Olahan Penulis, 2022

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengukuran skala Likert. Menurut Sugiyono (2014:132) Skala Likert adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Maka penelitian ini membedakan keadaan kedalam 3 (tiga Kategori) yaitu: Terlaksana 3 (skor), Cukup Terlaksana 2 (Skor), Kurang Terlaksana 1 (skor). Adapun kategori pengukuran indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator variabel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator variabel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator variabel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator variabel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator variabel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator variabel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

3. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil dan Evaluasi

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator variabel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator variabel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator variabel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pikiran-pikiran dan tanggapan informasi penelitian mengenai permasalahan yang diteliti dari locus penelitian (Sugiyono, 2013:19). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan sesuatu hal. Menggambarkan dalam hal ini yaitu mendeskripsikan hal-hal yang didapat dari data lapangan atau penelitian dengan kata-kata.

Oleh karena itu, penulis memilih tipe penelitian dengan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara wawancara, angket (Quisioner) dan observasi untuk pengumpulan data. Data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Adapun objek penelitiannya adalah di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tapung Makmur. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti menemukan permasalahan yang menarik dan layak untuk diangkat dalam suatu penelitian ilmiah. Dengan perkiraan lama penelitian ini adalah mulai dari bulan september-desember tahun 2021.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018;80). Populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelindung (Kepala Desa)
- b. Penasehat program kampung KB
- c. Ketua program kampung KB
- d. Sekretaris program kampung KB
- e. Bendahara program kampung KB
- f. Peserta program kampung KB (BKB, BKR, BKL)

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2018:81) bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul Representatif (mewakili). Penelitian ini menggunakan rumus slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus proportional atau berimbang.

$$N = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

N = ukuran populasi

N = ukuran sampel

e = presentase (%), toleransi ketidak telitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel

Untuk menentukan sampel dari masing-masing populasi masyarakat

Kampung KB sesuai proporsinya dengan rumus sebagai berikut :

$$N = \frac{n}{S} \times n$$

Keterangan :

N= jumlah sampel tiap peserta program kampung KB

n = jumlah populasi tiap peserta program kampung KB

S= jumlah total populasi semua peserta kampung KB

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pelindung Program Kampung KB	1	1	100%
2	Pembina Program Kampung KB	1	1	100%
3	Ketua Program Kampung KB	1	1	100%
4	Sekretaris Program Kampung KB	1	1	100%
5	Bendahara Program Kampung KB	1	1	100%
6	Peserta program kampung KB (BKB)	72	15	21%
7	Peserta program kampung KB (BKR)	126	16	13%
8	Peserta program kampung KB (BKL)	45	14	31%
Jumlah		248	50	20%

Sumber: *Olahan Penulis, 2021*

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability* sampling berupa *accidental sampling*, yaitu suatu metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2010).

E. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data Sumber data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dan memberikan angket kepada responden atau objek penelitian yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam program kampung KB.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Sumber data sekunder dalam hal ini diperoleh dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, dengan maksud agar data yang didapatkan jauh lebih lengkap dan akurat, dimana teknik ini menurut Sugiyono (2012:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi. Metode ini menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.

2. Kuesioner

Kuesioner atau daftar pertanyaan yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis sesuai permasalahan penelitian, kemudian disebarkan kepada responden terpilih untuk diisi dengan alternatif dan jawaban yang sudah disediakan.

3. Wawancara

Metode wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan. Dalam wawancara, alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan menjelaskan kepada responden.

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi, alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumen. Dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen tersedia. Juga termasuk dokumen-dokumen ekspresif, seperti biografi, autobiografi, surat-surat, dan buku harian. Dan termasuk juga laporan media massa baik melalui surat berkabar, majalah, radio, televisi, maupun media cetak dan elektronik lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan sudah diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan hasil wawancara.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal waktu kegiatan peneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																																							
		Sep				Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP																																								
2	Seminar UP																																								
3	Revisi UP																																								
4	Revisi Wawancara																																								
5	Analisis Data																																								
6	Bimbingan Skripsi																																								
7	Revisi Skripsi																																								
8	ACC Skripsi																																								
9	Ujian Skripsi																																								
10	Perbaikan																																								

Sumber: Olahan Penulis, 2022

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini memuat tentang studi kepustakaan yang digunakan, kerangka pikir, konsep operasional dan operasional variabel.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data. teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran tempat penelitian, sejarah ringkas, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tapung Makmur

1. Kondisi Geografis

Wilayah Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar seluas 1.513 Ha yang berbatas dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bringin Lestari
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tndan Sari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanah Tinggi
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Tapung Lestari

Kondisi struktur tanah sekitar 100 % daratan Dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa Sawit dan dimanfaatkan untuk perekonomian Petani sawit.

Iklm Desa Tapung Makmur sebagaimana desa – desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola pertumbuhan pada lahan perkebunan sawit yang ada di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir.

2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data sensus penduduk Januari – Desember Tahun 2020 jumlah penduduk desa yang tercatat sebagai berikut :

Jumlah penduduk	:	2011	jiwa
Jumlah KK	:	546	jiwa

3. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sedikit mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Adapun yang menjadi tolak ukur penilaian tersebut adalah melihat bertambah Tenaga Kerja masyarakat dan perkembangan Pendapatan Masyarakat.

Dalam Catatan Pelayanan Kami , sekitar 10 % masyarakat Desa mempunyai usaha sampingan selain dari pekerjaan Pokoknya. Hal ini dibuktikan karena banyak warga yang meminta surat keterangan Usaha yang dipergunaan sebagai syarat memperoleh pinjaman Modal Usaha.

a. Potensi Unggulan Desa

Melihat Perkembangan dari semua sector Perkebunan Kelapa Sawit di wilayah Desa potensi unggulan desa adalah di sector Perkebunan Kelapa Sawit.potensi yang cukup pesat perkembangannya adalah Perkembangan Perkebunan kelapa Sawit.tetapi hal ini tidak mendatangkan income terhadap pemerintah desa karena kewenangan untuk mengelola retribusi , pajak dan izin oprasional tidak diberikan oleh pemerintahan kabupaten kepada desa.

Secara Spesifik sesuai dengan data – data yang ada didesa bahwa potensi unggulan desa belum dapat di kategorikan sebagai unggulan , tetapi potensi desa yang ada saat ini belum tergali secara maksimal seperti, Usaha Dagang, Pertanian , Perikanan dan Properti.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Masyarakat Desa yang mayoritas sebagai pendatang berbagai macam tingkat pendidikan, Pekerjaan dan Tingkat Ekonomi. Berdasarkan data penduduk Desember 2020 menurut mata pencaharian dan pekerjaan dapat diklarifikasi sebagai berikut dari penduduk usia kerja.

Sesuai dengan jenis mata pencaharian yang ada diatas, bahwa tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat Desa dapat dikatakan golongan menengah kebawah. Tingkat kemiskinan berdasarkan hasil pendataan Desember 2020 menunjukkan, dari Jumlah penduduk 2011 jiwa yang tergolong KK Keluarga Miskin sebanyak 137 KK atau 367 Jiwa.

Berikut kami sampaikan Table data Kepala Keluarga, Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin Desa Periode 2018 – 2020 Sebagai berikut :

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin Desa Tapung Makmur Periode 2018-2020

No	Tahun	2018	2019	2020
1	Jumlah KK	579	551	546
2	Jumlah Penduduk	2.162	1.879	2.011
3	Jumlah RTM	137	137	137

Sumber: Desa Tapung Makmur, 2021

Melihat dari ekonomi makro pertumbuhan ekonomi mengalami Penurunan antara 1,3 sampai 2% , masyarakat Desa kesulitan dengan kenaikan – kenaikan harga terutama kebutuhan Pokok. Hal ini terjadi

bukan hanya di daerah kami , melainkan diseluruh wilayah Indonesia. disisi lain terjadi peningkatan seperti pembangunan sarana infrastruktur desa serta fasilitas social ekonomi masyarakat artinya jika dibuat pengelompokan bahwa Keluarga miskin yang ada di wilayah Desa ini merupakan pindahan dari wilayah lain, tetapi suka atau tidak hal ini tidak bisa kita batasi karena hak seluruh warga Negara Republik Indonesia dimanapun dia bertempat tinggal menetap yang sudah mencukupi 6 (enam) bulan lamanya.

Data Keluarga Miskin yang tercantum pada tahun 2020 adalah warga yang menerima Bantuan beras Miskin (Raskin) dan warga yang mendapatkan penghasilan dibawah rata rata. Data ini setiap tahunnya di kroscek kembali dan jika telah meningkat ekonominya atau tidak memenuhi syarat sebagai keluarga miskin, maka nama tersebut tidak diusulkan lagi sebagai keluarga miskin.

Berdasarkan Hasil pengecekan dan palidasi data keluarga miskin , maka jumlah kepala keluarga yang diusulkan sebagai keluarga miskin adalah sebanyak 137 KK/ 367 Jiwa sedangkan ketentuan lain yang disampaikan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar bahwa Kartu Jamkeas yang lama tidak berlaku lagi dan bagi warga yang tidak terdata yang diusulkan sebagai keluarga miskin jika diperukan untuk berobat maka prosedur yang dijalani malalui surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dilegalisir oleh camat dan

dilanjutkan dengan mengambil rujukan Kepuskesmas dan disahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2018 – 2023 yang disetujui Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tapung Makmur pada Tanggal 08 Januari 2018 Bahwa Visi dan Misi Desa termaksud Sebagai Berikut :

Visi

“ Mewujudkan Desa Tapung Makmur Menjadi Desa Yang Bersinar (Bersih, Elok, Rapi, Sopan, Netral, Aaman, Dan Ramah) “

Misi

1. Meningkatkan Iman Dan Takwa
2. Meningkatkan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat
3. Peningkatan Budaya Gotong Royong.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Sesuai dengan Perdes Nomor 2 Tahun 2018 Tentang RPJMDes telah menggariskan bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Desa Ditahun 2018 – 2023, maka arah kebijakan Pembangunan Desa di prioritaskan pada bidang – bidang sebagai berikut :

- a. Pengadaan dan Perbaikan sarana Infrastruktur, Pendidikan dan kesehatan Masyarakat.

- b. Peningkatan Hasil Pertanian dan Keanekaragaman jenis usaha dengan system Intensifikasi .
- c. Pengadaan dan Perbaikan sarana Infrastruktur, Pendidikan dan kesehatan Masyarakat.
- d. Pengadaan Permodalan bagi masyarakat dan perluasan lapangan kerja, termasuk manajemen usaha.
- e. Peningkatan Keterampilan dan sumber daya manusia.

6. **Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020**

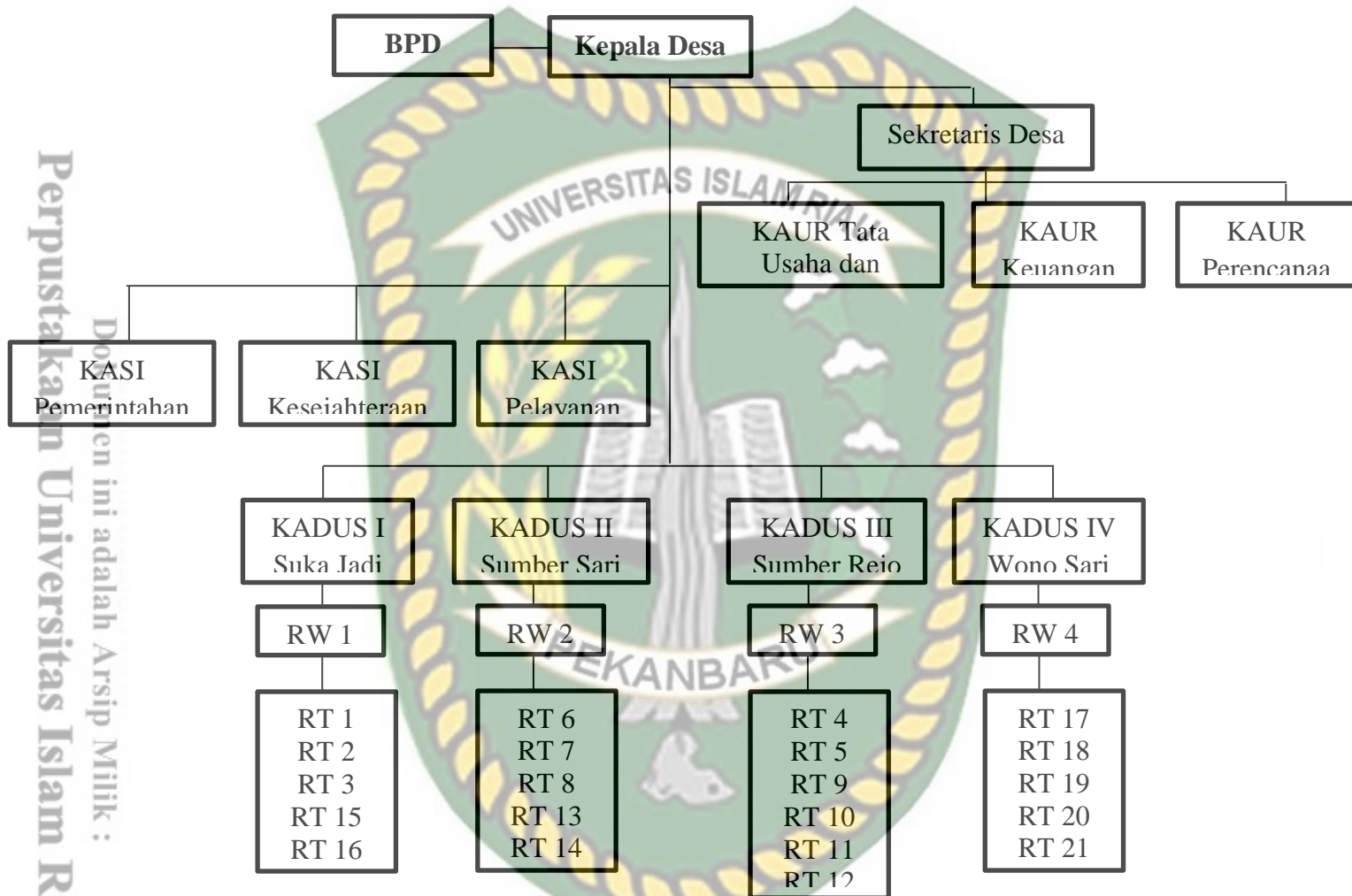
Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2019 yang paling di prioritaskan adalah :

- a. Pembangunan Sarana/ prasarana jalan
- b. Pembangunan Sarana Fasilitas Umum (Masyarakat)
- c. Perbaikan Parit / Drainase
- d. Perbaikan Jalan Lingkungan Desa.
- e. Pembangunan gedung TK
- f. Peningkatan Usaha Kecil melalui Program Simpan pinjam
- g. Peningkatan usaha kecil melalui Program BUMDES
- h. Peningkatan pendapatan melalui usaha ternak sapi

7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tapung Makmur

Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tapung

Makmur



Sumber: Profil Desa Tapung Makmur, 2021

B. Gambaran Umum Kampung KB Desa Tapung Makmur

1. Profil Kampung KB Desa Tapung Makmur

Kampung keluarga berencana (KB) merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Tujuan khusus dari kampungkeluarga berencana, yaitu:

- a. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunanberwawasan kependudukan.
- c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern.
- d. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.
- e. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS.
- f. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

- g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- h. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah.
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.
- j. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih.
- k. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/remaja.
- l. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok PIK KRR/mahasiswa dan seterusnya.

Sasaran dalam kampung keluarga berencana, yaitu: keluarga, remaja, penduduk lanjut usia (lansia), pasangan usia subur (PUS), keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing masing.

Dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan pembentukan kampung KB: Jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) di atas rata-rata Pra KS- dan KS-1 tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada, jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

Setelah terpenuhi dua kriteria utama pemilihan dan pembentukan kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut: kumuh, pesisir/nelayan, daerah aliran sungai (DAS), bantaran kereta api,

kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, padat penduduk

2. Tahapan Pembentukan Kampung KB

a. Komitmen

- 1) Bupati/Walikota
- 2) Sektor terkait
- 3) Camat
- 4) Kepala Desa/Lurah
- 5) Ketua RW/RT
- 6) Masyarakat

b. Profil Wilayah Calon Kampung KB:

- 1) Luas dan letak Geografis wilayah
- 2) Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB
- 3) Data demografi wilayah Kampung KB
- 4) Data Keluarga Berencana
- 5) Data Sosial Ekonomi

c. Proses Penetapan

- 1) Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dengan Bupati/Walikota dan Kepala SKPD KB.
- 2) Penyusunan Struktur Organisasi Kampung KB oleh SKPD KB dandisahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota.

3) Rekapitulasi wilayah Kampung KB beserta SK Struktur Organisasinya dikirimkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi kepada Kepala BKKBN

d. Penyediaan Data Dan Informasi

- 1) Data anggota Keluarga/Data Individu.
- 2) Data dan Informasi yang terkait dengan catatan sipil pada lokasi Kampung KB.
- 3) Data dan informasi Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader per-Bidang

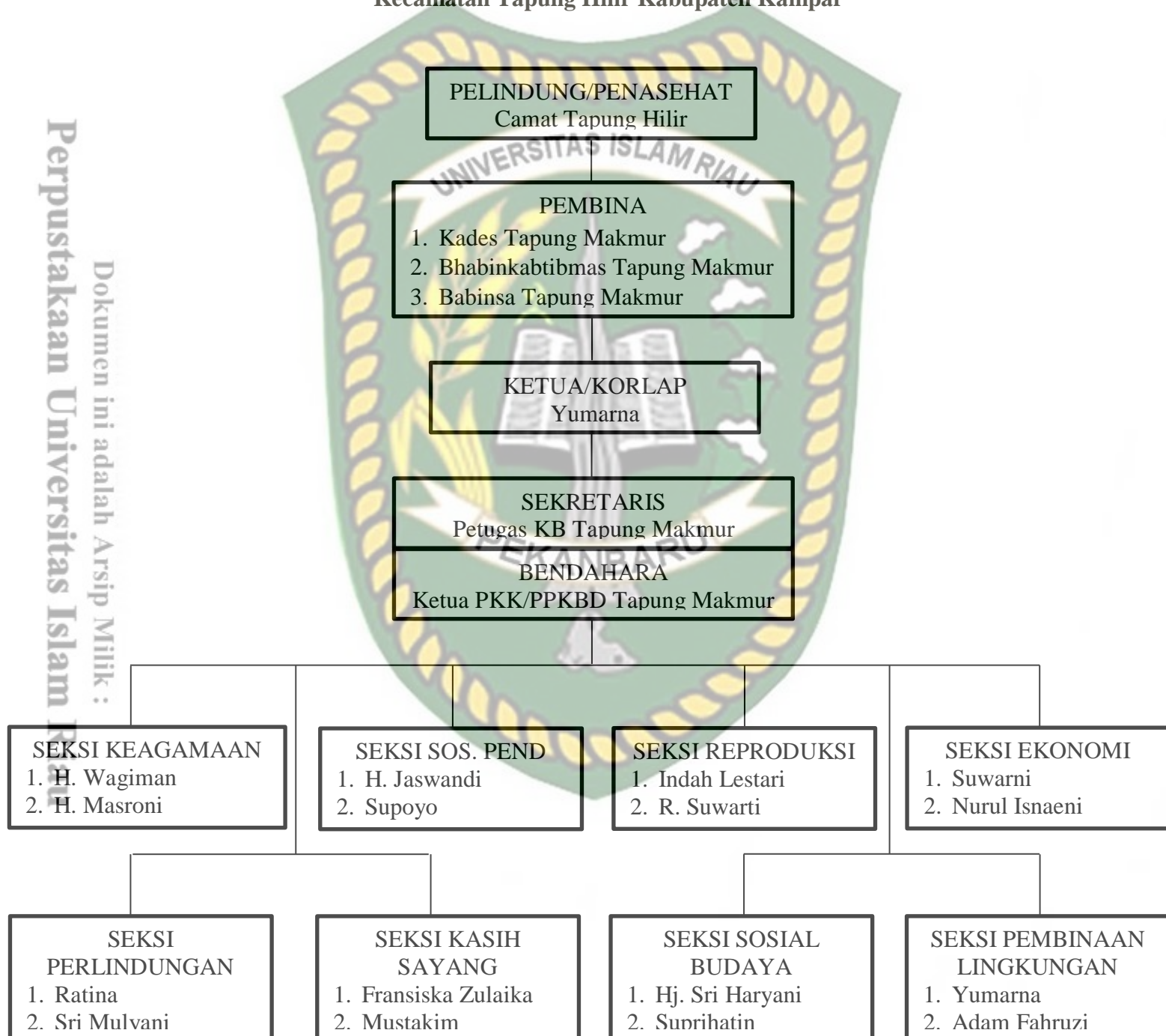
Manajemen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mensosialisasi program kampung keluarga berencana (KB) menggunakan fungsi-fungsi manajemen yaitu membuat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Bentuk perencanaan yang dilakukannya disini adalah melakukan pembinaan, mengadakan pelatihan, dan lain sebagainya.

Didalam pengorganisasian membentuk tim yang akan diturunkan dilapangan. Didalam penggerakan dibuat suatu strategi untuk mensukseskan program kampung keluarga berencana ini. Dan yang terakhir ialah pengawasan, setelah dilakukan sosialisasi tim kembali lagi melakukan survey untuk mengetahui sebagaimana berjalannya program tersebut.

3. Struktur Organisasi Kampung KB Desa Tapung Makmur

Gambar IV.2 Struktur Pengelola Pokja Kampung KB Desa Tapung Makmur

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar



Sumber: Profil Desa Tapung Makmur, 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini yang paling berpengaruh penting adalah responden, karena responden itu sendiri merupakan sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, penulis mengumpulkan data-data dan sekaligus menganalisa hasil data yang terdapat pada kuesioner penelitian yang diawali dengan identitas responden dalam melakukan penelitian ini.

Sehubungan dengan penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar diperlukannya data atau identitas responden agar penulis bisa membagikan perkelompoknya, adapun identitas responden yang dianggap perlu untuk dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam melakukan tindakan dan berfikir dalam melakukan sebuah pengambilan keputusan. Biasanya yang lebih tua cenderung lebih jearah bekerja dan berfikir lebih matang, karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam kegiatan yang dia lakukan sekaligus dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden tentang Partisipasi

Masyarakat Dalam Program Kampung KB Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1: Identitas Responden Aparatur Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	20-30	0	0%
2	31-40	1	20%
3	Diatas 40	4	80%
Jumlah		5	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dari pihak aparat Program Kampung KB Desa Tapung Makmur ada 5 orang yakni Pelindung, Pembina, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan bendara Program Kampung KB Desa Tapung Makmur. Responden yang dipilih terdiri dari 1 orang dengan kriteria usia 31-40 tahun dengan presentase 20%, dan 4 orang dengan kriteria usia diatas 40 tahun dengan presentase 80%.

Tabel V.2: Identitas Responden Peserta Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	20-30	4	9%
2	31-40	18	40%
3	Diatas 40	23	51%
Jumlah		45	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dari peserta BKR, BKB, dan BKL di Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV berdasarkan tingkat usia ada 45 orang. Responden yang dipilih terdiri dari 45 orang, 4 orang dengan kriteria usia 20-30 tahun dengan presentase 9%, 18 orang dengan kriteria usia 31-40 tahun dengan presentase 40% dan 23 orang dengan kriteria usia diatas 40 tahun dengan presentase 51%.

2. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin terbagi menjadi dua jenis kelamin, yaitu jenis kelamin Laki-Laki dan jenis kelamin Perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi tingkatan emosional responden yang bersangkutan didalam melakukan kegiatan sekaligus didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3: Identitas Responden Aparatur Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	2	40%
2	Perempuan	3	60%
Jumlah		5	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dari pihak aparat Program Kampung KB Desa Tapung Makmur ada 5 orang yakni Pelindung, Pembina, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan bendara Program Kampung KB Desa Tapung Makmur. Responden yang dipilih terdiri dari 2 orang berjenis kelamin laki-laki dengan presentase 40%, dan 3 orang berjenis kelamin perempuan dengan presentase 60%.

Tabel V.4: Identitas Responden Peserta Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	0	0%
2	Perempuan	45	100%
Jumlah		45	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dari peserta BKR,BKB, dan BKL di Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV berdasarkan jenis kelamin ada 45 orang dan kesemuanya berjenis kelamin perempuan.

3. Tingkat Pendidikan

Selanjutnya dalam identitas responden pada penelitian ini terdapat juga identitas tingkat pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.5: Identitas Responden Aparatur Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA	2	40%
2	Diploma	1	20%
3	Sarjana (S1/S2)	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi bagaimana dan cara kerja aparatur dinas. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki aparatur program Kampung KB maka akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, akan tetapi jika tingkat pendidikannya semakin rendah maka kemampuan melaksanakan tugasnya juga akan semakin kurang. Adapun responden dari pihak aparatur Program Kampung KB Desa Tapung Makmur terdapat 2 orang dengan tingkat pendidikan SMA dengan presentase 40%, 1 orang dengan tingkat pendidikan diploma dengan presentase 20%, dan 2 orang dengan tingkat pendidikan S1 dengan presentase 40%.

Tabel V.6: Identitas Responden Peserta Program Kampung KB Desa Tapung Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	12	25%
2	SMP	14	31%
	SMA	13	29%
3	Sarjana	6	13%
	Jumlah	45	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dari peserta program Kampung KB Desa Tapung Makmur. Responden yang dipilih terdiri dari 48 orang, 12 orang berpendidikan SD dengan presentase 25%, 14 orang berpendidikan SMP dengan presentase 33%, 13 orang berpendidikan SMA dengan presentase 30%, dan 6 orang berpendidikan Sarjana dengan presentase 12%.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Keberhasilan program Kampung KB tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi peran seluruh komponen masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan tonggak utama dalam upaya pencapaian sasaran program pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat terhadap suatu program akan meningkatkan kelancaran dari suatu program tersebut. Adanya partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB akan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor, mensejahterakan masyarakat dan membangun masyarakat berbasis keluarga.

Partisipasi masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kampung KB sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan program-program pembangunan lainnya yang telah disesuaikan pada wilayah Desa Tapung Makmur.

Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dalam penelitian dapat dilihat dan dinilai dari tiga indikator yang meliputi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil dan Evaluasi.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu partisipasi yang berkaitan tentang pemberian gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama dalam pencapaian program kampung KB di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan harus dilihat secara spesifik sehingga program kampung KB tersebut dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari program yang dilaksanakan. Sehingga partisipasi masyarakat dapat dijadikan alat pengukuran untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan program Kampung KB.

Selanjutnya untuk mengetahui indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur terdapat 3 item yang dinilai yaitu Keputusan Awal, Keputusan yang Sedang Berlangsung dan Keputusan Operasional.

a. Keputusan Awal

Menurut James A.F. Stoner pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.

Keputusan awal diawali dengan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada pada masyarakat kemudian diberikan suatu solusi atas permasalahan tersebut. Keputusan awal ini mencakup pada gagasan, formulasi, perumusan rencana dan lainnya dalam menunjang pelaksanaan dari program Kampung KB.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berasal dari aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB Desa Tapung Makmur yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator Keputusan Awal. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.7: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Mengenai Indikator Keputusan Awal

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Gagasan	0 (0%)	15 (30%)	35 (70%)	50
2	Rencana Kegiatan	0 (0%)	15 (30%)	35 (70%)	50
3	Perumusan Rencana	0 (0%)	15 (30%)	35 (70%)	50
	Jumlah	0	45	105	150
	Rata-rata	0	15	35	50
	Persentasi	0%	30%	70%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel V.7 bahwa tanggapan responden aparatur pelaksana dan masyarakat peserta program Kampung KB mengenai indikator Keputusan Awal berada pada kategori “Tidak Terlaksana”. Hal ini disebabkan dari jumlah responden 45 orang hanya 15 responden memberikan jawaban bahwa indikator keputusan awal cukup terlaksana, namun 35 orang responden memberikan jawaban kalau indikator tersebut tidak terlaksana.

Gagasan atau ide, Formulasi Perumusan Rencana. dan Dari jawaban responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB yang menjawab Tidak Terlaksana, dikarenakan penetapan Desa Tapung Makmur menjadi sasaran program kampung KB perencanaan atau keputusan awalnya ditentukan oleh stakeholder yang terkait. Hal ini disebabkan sulitnya menunggu jika inisiatif berasal dari masyarakat sendiri untuk membuat program kampung KB di wilayahnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Pelindung Program Kampung KB yakni Camat Tapung Hilir Bapak Hadinur Rahman mengenai indikator Keputusan Awal dengan pertanyaan Apakah keputusan awal tentang pelaksanaan program Kampung KB melibatkan partisipasi masyarakat ?. Beliau Menjawab:

“Sebenarnya untuk wilayah perencanaan itu sudah ada dari pemerintah kabupaten. Jadi dia sifatnya vertikal, dari atas kebawah. Bukan dari bawah ke atas. Kampung KB dibentuk karena kan disana peserta KB nya rendah, kedua melihat kondisi wilayahnya yang kurang bersih, kepedulian terhadap lingkungan, sehingga keberadaan Kampung KB kita harapkan peserta KB nya meningkat, keterlibatan mereka dalam program pembangunan juga meningkat”. (Wawancara : Senin tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa program Kampung KB di Desa Tapung Makmur merupakan inisiatif dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Pembina Program Kampung KB Desa Tapung Makmur yakni Bapak Amas Ramadan Sitompul, dengan pertanyaan apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan awal pembentukan Kampung KB ?. Beliau menjawab:

“Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan awal pembentukan Program Kampung KB tidak dilibatkan, namun ketika Program Kampung KB dibentuk pada wilayah yang telah memenuhi kriteria untuk pembentukan Kampung KB masyarakat akan dilibatkan untuk sama-sama membangun Kampung KB diwilayahnya tersebut.”
(Wawancara : Selasa tanggal 15 Februari 2022, pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa pembentukan Program Kampung KB tidak melibatkan masyarakat namun akan dilibatkan pada pelaksanaan demi kesuksesan Kampung KB. Masyarakat memberikan pengaruh terhadap suatu program untuk membangun lingkungan mereka kearah yang lebih baik. Masyarakat merupakan tonggak utama dalam menunjang keberhasilan suatu program. Dalam program Kampung KB ini yang tidak hanya merupakan suatu bentuk pemasangan alat kontrasepsi namun juga kegiatan lintas sektor lainnya.

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh Ketua Pokja Program Kampung KB Desa Tapung Makmur yakni Ibu Yumarna, dengan pertanyaan

apakah terdapat partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan awal dalam program Kampung KB di Desa Tapung Makmur?. Beliau menjawab:

“Partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan awal, sebenarnya ini tidak dilakukan dikarenakan ini sudah ada petunjuk teknis dari BKKBN untuk membentuk Kampung KB kemudian untuk data dari BKKBN Provinsi sudah ada memang masuk dari Kementerian Desa dalam kategori desa-desa di Riau yang sangat tertinggal untuk dibentuk Kampung KB.” (Wawancara : Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan tidak ada karena telah ada petunjuk teknis mengenai Kampung KB. Dan untuk pelaksanaannya memiliki kriteria tertentu untuk dijadikan sebagai Kampung KB dengan mengambil data desa tertinggal dari Kementerian Desa.

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh salah satu peserta program Kampung KB lebih tepatnya peserta Bina Keluarga Lansia di Dusun II yaitu Ibu Sri Haryani, dengan pertanyaan adakah masyarakat terlibat dalam pembentukan Kampung KB Desa Tapung Makmur ?. Beliau Menjawab:

“Kami hanya tahu ketika Pak RW mengajak untuk membenahi lingkungan karena akan ada pembentukan Kampung KB di wilayah kami”. (Wawancara : Sabtu tanggal 19 Februari 2022, pukul 15.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar baru mengetahui akan ada pembentukan Kampung KB ketika telah adanya pemberitahuan dari pemerintah setempat dalam hal ini adalah lingkup pemerintahan RW.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi dalam Pengambilan keputusan awal dalam program Kampung KB Desa Tapung Makmur masyarakat belum dilibatkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program Kampung KB Kabupaten Kampar menggunakan metode dari atas kebawah yaitu berawal dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DPPKBP3A) memiliki kedudukan tinggi mengenai Keluarga Berencana di Kabupaten Kampar. Maka Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki wewenang dalam pelaksanaan Program Kampung KB kemudian mengalir ke Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Desa Tapung Makmur menyebarkan kepada seluruh masyarakat Desa Tapung Makmur.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan awal dapat dilakukan masyarakat dalam pengembangan ide suatu program (Supriatna, 2010:89). Partisipasi dalam pengembangan ide seseorang atau sekelompok orang turut memberikan saran atau ide-ide demi kebaikan pelaksanaan suatu program. Partisipasi ini merupakan tahap pertama dalam menyelesaikan suatu program yang akan dilaksanakan.

Tidak adanya partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan awal ini maka akan berpartisipasi pada pengambilan keputusan yang sedang berlangsung.

b. Keputusan yang Sedang Berlangsung

Partisipasi dalam keputusan yang sedang berlangsung untuk mengetahui kebutuhan dan prioritas baru di Desa Tapung Makmur yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program Kampung KB dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indikator Keputusan yang Sedang Berlangsung ini mencakup kebutuhan dan prioritas.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana memiliki peran penting dalam menyiapkan data dan informasi tentang kebutuhan dan permasalahan strategis yang berada pada lingkungan Kampung KB untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan Kampung KB. Data dan informasi tersebut dapat diterima dari masyarakat melalui forum musyawarah Kampung KB.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berasal dari aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB Desa Tapung Makmur yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator Keputusan yang Sedang Berlangsung. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.8: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Mengenai Indikator Keputusan yang Sedang Berlangsung

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Kebutuhan	24 (48%)	16 (32%)	10 (20%)	50
2	Prioritas	24 (48%)	16 (32%)	10 (20%)	50
	Jumlah	48	32	20	100
	Rata-rata	24	16	10	50
	Persentasi	48%	32%	20%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel V.8 bahwa tanggapan responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB mengenai indikator Keputusan yang Sedang Berlangsung berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini disebabkan dari jumlah responden 50 orang 24 responden memberikan jawaban bahwa indikator keputusan yang sedang berlangsung terlaksana, 16 responden menjawab indikator keputusan yang sedang berlangsung cukup terlaksana dan hanya 10 responden yang menjawab indikator keputusan yang sedang berlangsung tidak terlaksana.

Item yang dinilai dari indikator dalam keputusan yang sedang berlangsung adalah kebutuhan dan prioritas. dan Dari jawaban responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB yang menjawab Terlaksana, dikarenakan pentingnya keberadaan masyarakat dalam penetapan kebijakan suatu program dan kegiatan. Hal ini berarti posisi masyarakat yang berpartisipasi memiliki andil yang sangat menentukan apakah suatu program tersebut bisa berhasil atau tidak. Sehingga masyarakat memang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang sedang berlangsung.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina Program Kampung KB yakni Kepala Desa Tapung Makmur yakni Bapak Amas Ramadan Sitompul mengenai indikator Keputusan yang Sedang Berlangsung dengan pertanyaan Apakah keputusan yang sedang berlangsung tentang pelaksanaan program Kampung KB melibatkan partisipasi masyarakat ?. Beliau Menjawab:

“Jadi kan Kampung KB itu ada namanya forum musyawarah Kampung KB jadi apa mau dibahas mengenai pembangunan Kampung KB itu ada pertemuan rutinya, jadi disini misalnya masyarakat bisa melapor istilahnya memberikan informasi apa-apa saja kendala mereka atau apa yang mereka butuhkan misalnya mereka disini tinggi angka

pernikahan dibawah umur kita panggil dari KUA untuk penyuluhan.” (Wawancara : Selasa tanggal 15 Februari 2022, pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang sedang berlangsung yaitu dengan memberikan masukan mengenai apa saja yang masyarakat butuhkan. Dengan adanya ide dan gagasan mengenai hal-hal yang dibutuhkan dimasyarakat dapat menjadikan informasi untuk pemerintah agar dapat membuat kegiatan di Kampung KB tersebut. Melalui forum musyawarah masyarakat dapat mengeluarkan pendapat yang akan memudahkan pelaksana program Kampung KB Desa Tapung Makmur.

Keberhasilan suatu program, bentuk dan hasilnya tidak akan lepas dari adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap-tahap tertentu, keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan mengingat bahwa suatu ide, gagasan, pemikiran ataupun pendapat dari masyarakat dapat menjadi pertimbangan.

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh Ketua Pokja Program Kampung KB Desa Tapung Makmur yakni Ibu Yumarna, dengan pertanyaan apakah terdapat partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan yang sedang berlangsung dalam program Kampung KB di Desa Tapung Makmur?. Beliau menjawab:

“Pengambilan keputusan selalu melibatkan masyarakat pada setiap musyawarah dalam forum Kampung KB. Kalau forum Kampung KB itu ada narasumber, narasumbernya biasa dari sini atau juga kadang kita panggil Kepala desa.” (Wawancara : Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan yang sedang berlangsung, masyarakat dapat dilibatkan melalui forum Kampung KB yang telah dibentuk. Tidak hanya sebagai forum untuk mengeluarkan pendapat, tetapi forum Kampung KB digunakan untuk advokasi dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ber-KB.

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh salah satu peserta program Kampung KB lebih tepatnya peserta Bina Keluarga Balita di Dusun III yaitu Ibu Dasimah, dengan pertanyaan adakah masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang sedang berlangsung mengenai program Kampung KB Desa Tapung Makmur ?. Beliau Menjawab:

“Biasanya kami ada pertemuan di lapangan atau dimana yang bisa ditempati untuk kumpul, disana kita terima kaya’ penyuluhan begitu, yaa kalau kan ada penyuluhan pasti ada sesi tanya jawab atau pemberian saran,jadi kami biasa memberikan saran tentang apa saja yang perlu dilakukan untuk menyukseskan ini Kampung KB.” (Wawancara : Senin tanggal 21 Februari 2022, pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat dilibatkan dalam rapat untuk membahas mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam lingkungan tersebut ataupun dapat memberikan saran bila ada penyuluhan yang dilakukan di Kampung KB tersebut. Hal ini juga dikatakan oleh kader KB yang mengikuti program Bina Keluarga Remaja di Dusun I yaitu Ibu Misriyah, dengan pertanyaan apakah terdapat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang sedang berlangsung tentang Program Kampung KB Desa Tapung Makmur?. Beliau menjawab :

“Iya biasa ada perkumpulan setiap bulan satu kali masalah KB ini masalah Kampung KB biasa ada forum musyawarah, jadi kami biasa kumpulkan masyarakat meskipun kurang maksimal karena kan disini banyak kesibukan masing-masing.” (Wawancara : Senin tanggal 21 Februari 2022, pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa setiap bulan selalu ada pertemuan untuk membahas mengenai Kampung KB melalui forum musyawarah yang melibatkan masyarakat meskipun belum maksimal karena kurangnya masyarakat hadir dalam pertemuan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan yang sedang berlangsung dalam program Kampung KB, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk menghadiri forum musyawarah, rapat, penyuluhan serta dapat memberikan keluhan-keluhan maupun saran yang sebaiknya dilakukan untuk mensukseskan Kampung KB. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang sedang berlangsung dalam hal ini merupakan suatu keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan- kebutuhan strategis dan keluhan yang ada dalam lingkungan Kampung KB sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk perencanaan program kegiatan kegiatan prioritas di Kampung KB.

Setiap penyelenggara program terutama dalam kehidupan bermasyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Dalam rumusan yang lain adalah menyangkut pembuatan atau pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat besar sekali, terutama karena keputusan yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Semakin besar kemampuan untuk

menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam suksesnya suatu program (Supriatna, 2010:90). Pengambilan keputusan program Kampung KB harus dilaksanakan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting.

Pengambilan keputusan akan lebih baik ketika masyarakat berpartisipasi karena akan lebih banyak pemikiran orang untuk memecahkan suatu masalah. Jika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan maka mereka akan antusias dalam pelaksanaan program. Hakikat dari sebuah pengambilan keputusan publik merupakan hal yang mutlak jika masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang khususnya menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri.

Pengambil keputusan mempunyai kepentingan atau tujuan yang berbeda, suatu keputusan yang dapat memuaskan semua pihak merupakan hal yang membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama, baik melalui interaksi, negosiasi maupun pemberian kesadaran. Forum musyawarah merupakan alternatif untuk mengumpulkan masyarakat agar dapat bertukar pikiran dan pendapat untuk mencapai mufakat untuk kepentingan masyarakat di lingkungan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang sedang berlangsung memiliki makna bahwa masyarakat ikut andil dalam penetapan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat di Kampung KB Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahap ini karena Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat dengan menggunakan konsep terpadu antara program KB dengan program pembangunan lainnya.

c. Keputusan Operasional

Keputusan operasional yaitu suatu keputusan yang dibuat oleh tingkat manajemen yang paling bawah. Keputusan operasional terkait dengan pembentukan struktur organisasi yang berperan untuk melibatkan masyarakat dalam pencapaian program Kampung KB. Partisipasi dalam keputusan operasional berkaitan dengan hal-hal seperti komposisi keanggotaan, prosedur rapat, pemilihan kepemimpinan dan lainnya dalam program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berasal dari aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB Desa Tapung Makmur yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator Keputusan Operasional. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.9: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Mengenai Indikator Keputusan Operasional

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Komposisi Keanggotaan	28 (56%)	12 (24%)	10 (20%)	50
2	Prosedur Rapat	28 (56%)	12 (24%)	10 (12%)	50
3	Pemilihan Kepemimpinan	28 (56%)	12 (24%)	10 (12%)	50
	Jumlah	84	36	30	150
	Rata-rata	28	12	10	50
	Persentasi	56%	24%	20%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel V.9 bahwa tanggapan responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB mengenai indikator Keputusan Operasional berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini disebabkan dari jumlah responden 50 orang 28 responden memberikan jawaban bahwa indikator keputusan operasional terlaksana, 12 responden menjawab indikator keputusan operasional cukup terlaksana dan hanya 10 responden yang menjawab indikator keputusan operasional tidak terlaksana.

Item yang dinilai dari indikator dalam keputusan operasional adalah komposisi keanggotaan, prosedur rapat dan pemilihan kepemimpinan. Dari jawaban responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB yang menjawab Terlaksana, dikarenakan keberadaan partisipasi masyarakat sangat menentukan suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Sebab pembentukan struktur organisasi Program Kampung KB jika dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat maka program tersebut dapat tercapai semua target yang telah dicanangkan sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokja Kampung KB Program Kampung KB yakni Ibu Yumarna mengenai indikator Keputusan Operasional dengan pertanyaan Apakah keputusan operasional tentang pelaksanaan program Kampung KB melibatkan partisipasi masyarakat ?. Beliau Menjawab:

“Kalau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program kemarin kita pengurusan pokja kelompok kerja saya libatkan saya kumpul memang semua kemudian kita diskusikan siapa bisa jadi ketua, sekretaris kemudian pelaksana seksi-seksi. Maksudnya ya mereka terlibat berpartisipasi semua alhamdulillah” (Wawancara : Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan bahwa masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja). Pokja merupakan kelompok manajemen tingkat paling bawah dari program Kampung KB. Masyarakat diberikan kepercayaan untuk memilih dan menentukan keanggotaan dari Pokja Kampung KB, karena masyarakat lebih mengetahui siapa saja yang dapat diberikan amanah dalam menjalankan tugas dalam kepemimpinan untuk pencapaian tujuan program Kampung KB. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Fransiska Zulaika selaku sekretaris program Kampung KB Desa Tapung Makmur mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan operasional, beliau menjawab :

“Dalam pembentukan pokja Kampung KB jadi bentuk partisipasinya masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pembentukan pokja itu, dari ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya merekalah yang menunjuk siapa yang dapat diberikan amanah. Jadi pengurus yang di pokjaitulah yang kami panggil dan beri informasi bahwa kita akan melaksanakan kegiatan disana jadi nanti mereka yang panggil masyarakat untuk hadir dalam kegiatan tersebut.” (Wawancara : Kamis tanggal 17 Februari 2022, pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan bahwa program Kampung KB dalam pelaksanaan dan kegiatannya dikelola oleh kelompok kerja yang dipilih oleh masyarakat. Hal ini baik untuk masyarakat karena memberikan anggapan bahwa program Kampung KB ini sebagai kegiatan milik mereka dan untuk kepentingan bersama.

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh pengurus pokja Kampung KB yang berkedudukan sebagai bendahara yaitu Ibu Endah Lestari mengenai keputusan operasional dalam program Kampung KB dengan pertanyaan apakah

terdapat partisipasi masyarakat dalam keputusan operasional program kampung KB Desa Tapung Makmur?. Beliau menjawab :

“Iya kami dulu disuruh kumpul untuk membahas tentang struktur organisasi tentang pengurus Kampung KB atau disebut dengan pokja Kampung KB, jadi Pak RW 02 itu jadi ketuanya karena kan memang beliau adalah orang yang memang betul-betul kami jadikan panutan lah begitu. Jadi kami menunjuk beliau untuk menjadi ketua Kampung KB dan saya juga selaku bendahara ditunjuk dari masyarakat juga.” (Wawancara : Jum’at tanggal 18 Februari 2022, pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa masyarakat diberikan sepenuhnya mengenai pengambilan keputusan dalam hal pembentukan pengurus Pokja Kampung KB. Pemilihan ketua, sekretaris, bendahara merupakan sesuatu yang dapat membuat masyarakat berpartisipasi untuk memilih pemimpin dalam pelaksanaan program Kampung KB di Desa Tapung Makmur.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Program Kampung KB dalam hal pengambilan keputusan operasional, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk pemilihan pengurus Kampung KB yang disebut dengan Pokja Kampung KB. Keaktifan partisipasi masyarakat dalam pemilihan ketua dan jajaran pokja merupakan suatu hal yang sangat penting agar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kepengurusan dalam hal ini Pokja sangat dibutuhkan karena program Kampung KB merupakan program pembangunan terpadu wujud dari sinergi dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program lintas sektor, agar dapat mengubah cara berfikir, sikap dan perilaku

masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB dengan pemilihan Kepala Pokja memiliki makna bahwa pelaksanaan Program Kampung KB dapat diimplementasikan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto (2012:67) adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan atau program. Partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan atau program untuk memperoleh manfaat.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan operasional dalam program Kampung KB sudah baik karena telah adanya struktur organisasi dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan hal ini dikarenakan adanya rasa kesadaran masyarakat sehingga ikut andil dalam program tersebut untuk berperan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan membangun keluarga kecil yang berkualitas.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menjalin kemitraan dan saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan program. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menunjang terlaksananya kebijakan atau kegiatan yang telah ditetapkan bersama di Kampung KB di Desa Tapung Makmur.

Selanjutnya untuk mengetahui indikator partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di

Desa Tapung Makmur terdapat 3 item yang dinilai yaitu Kontribusi Sumberdaya, Upaya Administrasi dan Koordinasi, serta Program Kepesertaan Kegiatan.

a. Kontribusi Sumberdaya

Kontribusi sumber daya dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti kontribusi tenaga, uang, materi, dan informasi dalam pelaksanaan program Kampung KB. Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berasal dari aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB Desa Tapung Makmur yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator Kontribusi Sumberdaya. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Mengenai Indikator Kontribusi Sumberdaya

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Penyediaan Tenaga Kerja	40 (80%)	6 (12%)	4 (8%)	50
2	Anggaran	40 (80%)	6 (12%)	4 (8%)	50
3	Informasi	40 (80%)	6 (12%)	4 (8%)	50
	Jumlah	120	18	12	150
	Rata-rata	40	6	4	50
	Persentasi	80%	12%	8%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel V.10 bahwa tanggapan responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB mengenai indikator Kontribusi Sumberdaya berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini disebabkan dari jumlah responden 50 orang 40 responden memberikan jawaban bahwa indikator kontribusi sumberdaya terlaksana, 6 responden menjawab indikator kontribusi sumberdaya cukup

terlaksana dan hanya 4 responden yang menjawab indikator kontribusi sumberdaya tidak terlaksana.

Item yang dinilai dari indikator dalam kontribusi sumberdaya seperti kontribusi tenaga, uang, materi, dan informasi. Dari jawaban responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB yang menjawab Terlaksana, dikarenakan partisipasi masyarakat akan menentukan suatu program tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sebab kontribusi sumberdaya masyarakat akan menjadikan program Kampung KB dapat berjalan baik dan tujuannya dapat tercapai.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tapung Makmur selaku Pembina Program Kampung KB yakni Bapak Amas Ramadan Sitompul mengenai indikator Kontribusi Sumberdaya dengan pertanyaan apakah kontribusi sumberdaya masyarakat tentang pelaksanaan program Kampung KB melibatkan partisipasi masyarakat ?. Beliau Menjawab:

“Jadi disana memang partisipasi masyarakatnya boleh dikatakan wah luar biasa disana pertama kalau ada kegiatan-kegiatan seperti pokoknya kalau ada kegiatan-kegiatan disana itu, kader-kader baik secara moril maupun material karena kalau ada pengecetan-pengecetan swadaya-swadaya masyarakat itu turut berpartisipasi tentang menyangkut masalah kegiatan- kegiatan Kampung KB. Jadi disana itu tidak terlalu masalah sih kalau partisipasinya baik secara fisik maupun non fisik” (Wawancara : Selasa tanggal 15 Februari 2022, pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB sangat baik atau dapat dikatakan terlaksana. Partisipasi kontribusi yang diberikan oleh masyarakat tidak hanya pada tenaga tetapi juga uang maupun materi. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari hasil kontribusi masyarakat yaitu pada saat akan adanya pencaangan

program Kampung KB, masyarakat melakukan pengecatan dan membeli peralatannya sendiri hal ini dilakukan untuk memperindah lingkungan. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat sadar akan pentingnya bekerja sama untuk membangun lingkungan yang indah dengan memberikan kontribusi uang dan tenaga.

Kontribusi sumber daya sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan program Kampung KB. Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Ibu Yumarna selaku ketua pokja kampung KB Tapung Makmur, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Jadi disana itu tidak terlalu masalah kalau partisipasinya baik secara fisik maupun non fisik”. kalau partisipasi kontribusi yang bersifat uang hanya saya lihat itu beli cat, kalau melihat sumbangan-sumbangan dari masyarakat itu ada tukang angkut sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan Kampung, jadi mereka sama-sama menyumbang. Kalau dalam hal informasi, ada kader-kader jadi mereka memberikan informasi yah seperti siapa-siapa saja masyarakat yang belum menjadi peserta KB atau belum memasang alat kontrasepsi. Kan kami juga biasa mengunjungi rumah-rumah untuk mengontrol atau mengecek ataupun berbicara mengenai pentingnya untuk ber-KB.” (Wawancara : Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kontribusi sumber daya sangat baik karena masyarakat saling bekerja sama dalam hal pembersihan keindahan lingkungan Kampung KB. Kebersihan merupakan wujud fisik dari Kampung KB, hal ini disadari oleh masyarakat yang setiap harinya membersihkan halaman rumah dan merawat tanaman untuk menciptakan suasana asri. Selain itu, masyarakat juga ikut andil untuk menjadi kader KB yang akan membantu dalam pencapaian pereserta KB.

Karena tujuan utama dari pembentukan Kampung KB yaitu untuk meningkatkan peserta KB.

Sementara itu, penjelasan juga diberikan oleh tokoh masyarakat dan juga peserta program Kampung KB lebih tepatnya Bina Keluarga Lansia yaitu Ibu Siti Alfiah yang merupakan warga Dusun IV Desa Tapung Makmur dengan pertanyaan apakah terdapat kontribusi sumberdaya masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB di Desa Tapung Makmur ? Beliau menjawab:

“Kalau partisipasi kontribusi dulu itu pernah ada kegiatan penyuluhan, kami peserta program BKL dan juga anggota Majelis Taklim pernah meminjamkan seperti kursi atau juga milik pribadi masyarakat seperti salon atau pengeras suara untuk dipinjamkan kepada pihak penyuluh Tri Bina atau kalau ada kegiatan senam lansianya yaa untuk kepentingan masyarakat juga kan (Wawancara : Sabtu tanggal 19 Februari 2022, pukul 15.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan bahwa adanya partisipasi masyarakat disetiap kegiatan yang dilakukan di Kampung KB seperti pelaksanaan kelompok Tri Bina yaitu penyuluhan untuk membina masyarakat dengan meminjamkan alat untuk menunjang pelaksanaan program. Kelompok Tri Bina tersebut terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Karena belum adanya suatu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelompok Kerja Kampung KB membuat pengurus harus mendapatkan bantuan dari masyarakat untuk meminjamkan peralatan demi kelancaran setiap kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB mengenai kontribusi sumber daya sudah baik. Partisipasi

masyarakat tidak hanya sekedar penerima program, tetapi juga ikut andil dalam setiap kegiatan seperti kontribusi uang untuk kegiatan kebersihan lingkungan hal ini berkaitan dengan program pemerintah Kabupaten Kampar. Selain itu, juga dapat dilihat dari kontribusi masyarakat dalam hal peminjaman alat untuk kelancaran dari kegiatan di Kampung KB. Kontribusi juga di berikan oleh masyarakat dalam hal pemberian informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian peserta KB melalui PLKB maupun kader KB.

b. Upaya Administrasi dan Koordinasi

Upaya administrasi dan koordinasi adalah cara masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan suatu program. Disini mereka dapat berpartisipasi sebagai anggota atau pengambilan keputusan dari suatu program. Mereka juga dapat menjadi anggota atau kader sukarela yang memainkan peran dalam mengoordinasi kegiatan mereka dengan program tersebut.

Susunan keanggotaan program Kampung KB ditentukan berdasarkan keputusan bersama oleh masyarakat. Pimpinan Program Kampung KB telah menetapkan petunjuk teknis dalam pelaksanaan program Kampung KB. Kemudian anggota kampung KB yang merupakan warga desa setempat dan juga dapat menentukan susunan keanggotaan program Kampung KB dengan adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berasal dari aparaturnya pelaksana dan peserta program Kampung KB Desa Tapung Makmur yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator Upaya Administrasi dan

Koordinasi dengan item yang dinilai adalah Anggota dan Pengambilan Keputusan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.11: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Mengenai Indikator Upaya Administrasi dan Koordinasi

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Anggota	34 (68%)	10 (20%)	6 (12%)	50
2	Pengambilan Keputusan	34 (68%)	10 (20%)	6 (12%)	50
	Jumlah	68	20	12	100
	Rata-rata	34	10	6	50
	Persentasi	68%	20%	12%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel V.11 bahwa tanggapan responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB mengenai indikator Upaya Administrasi dan Koordinasi berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini disebabkan dari jumlah responden 50 orang 34 responden memberikan jawaban bahwa indikator Upaya Administrasi dan Koordinasi terlaksana, 10 responden menjawab indikator Upaya Administrasi dan Koordinasi cukup terlaksana dan hanya 6 responden yang menjawab indikator Upaya Administrasi dan Koordinasi tidak terlaksana.

Item yang dinilai dari indikator dalam Upaya Administrasi dan Koordinasi seperti anggota dan pengambilan keputusan. Dari jawaban responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB yang menjawab Terlaksana, dikarenakan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh untuk menjalankan administrasi dan menjalin koordinasi dengan baik. Dengan adanya anggota yang aktif dari suatu program maka akan menjadikan program tersebut dapat berjalan

dengan semestinya. Kemudian partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan suatu program.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokja Program Kampung KB yakni Ibu Yumarna mengenai indikator Upaya Administrasi dan Koordinasi dengan pertanyaan apakah Upaya Administrasi dan Koordinasi tentang pelaksanaan program Kampung KB melibatkan partisipasi masyarakat ?.

Beliau Menjawab:

“Dalam menentukan susunan keanggotaan dalam pelaksanaan program Kampung KB berdasarkan keputusan bersama oleh masyarakat. Kemudian kami sebagai ketua pokja program kampung KB menetapkan petunjuk teknis dalam pelaksanaan program Kampung KB.” (Wawancara : Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa keanggotaan atau peserta yang terdapat dalam pelaksanaan program Kampung KB sangat memperhatikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Keanggotaan pelaksanaan program kampung KB juga dilakukan dengan menggunakan petunjuk teknis yang dibuat oleh ketua pokja program Kampung KB. Hal ini bertujuan untuk menentukan apa saja tugas dan fungsi dari pengurus dan peserta program kampung KB Desa Tapung Makmur.

Kemudian wawancara berikutnya dilakukan dengan Sekretaris Program Kampung KB Desa Tapung Makmur yakni Ibu Fransiska Zulaika mengenai indikator Upaya Administrasi dan Koordinasi dengan pertanyaan siapa saja kah anggota atau pengurus serta peserta program kampung KB di Desa Tapung Makmur ? Beliau menjawab :

“Adapun yang menjadi anggota atau peserta dan pengurus program Kampung KB adalah masyarakat asli di Desa Tapung Makmur. Kemudian

untuk susunan keanggotaan pengurus program Kampung KB Tapung Makmur ditentukan oleh suara atau partisipasi dari masyarakat.” (Wawancara : Kamis tanggal 17 Februari 2022, pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa upaya administrasi dan koordinasi pelaksanaan program Kampung KB di Desa Tapung Makmur telah dilakukan dengan baik. Dimana suara masyarakat sangat menentukan keputusan susunan kepengurusan program kampung KB. Kemudian mengenai peserta program dan pengurusnya juga merupakan masyarakat yang berasal dari Desa Tapung Makmur sendiri. Sehingga upaya koordinasi dalam pelaksanaan program kampung KB dapat berjalan dengan baik karena peserta dan pengurusnya berasal dari satu desa.

Sementara itu wawancara selanjutnya dilakukan dengan salah satu peserta program Kampung KB yaitu Ibu Yuliani yang merupakan peserta Bina Keluarga Balita dan berasal dari Dusun III Desa Tapung Makmur. Wawancara dilakukan untuk mengetahui mengenai indikator pengambilan keputusan dalam upaya administrasi dan koordinasi dengan pertanyaan apakah pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program kampung KB menyertakan partisipasi masyarakat? Beliau menjawab :

“Setau saya memang ketika menghadiri rapat dalam agenda pelaksanaan program Kampung KB di Desa Tapung Makmur ini. Masyarakat selalu aktif dalam mengikuti rapat dan hasil rapat juga ditentukan oleh suara dari peserta rapat itu sendiri terutama tuntutan dari kami peserta program bina di Kampung KB ini.” (Wawancara : Minggu tanggal 20 Februari 2022, pukul 16.30 WIB).

Pernyataan diatas sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Isnaini yang merupakan peserta Bina Keluarga Remaja dan berasal dari Dusun II Desa Tapung Makmur. Wawancara tersebut dilakukan dengan pertanyaan apakah pengambilan

keputusan dalam pelaksanaan program kampung KB menyertakan partisipasi masyarakat? Beliau menjawab :

“Memang masyarakat dilibatkan dalam rapat untuk membahas dan keputusannya diterima bersama. Kemudian masyarakat dapat dilibatkan dalam forum musyawarah kampung KB yang telah dibentuk agar menentukan keputusan yang diambil.” (Wawancara : Minggu tanggal 20 Februari 2022, pukul 16.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan bahwa dalam mengambil suatu keputusan pada suatu rapat tentang program Kampung KB sangat memperhatikan partisipasi masyarakat, sehingga keputusan yang diambil ditentukan oleh suara dari peserta dan pengurus program Kampung KB di Desa Tapung Makmur. Kemudian agar koordinasi dapat berjalan dengan baik maka pengurus menilai suara peserta dan pengurus program Kampung KB bernilai sama dan tidak ada perbedaan satu sama lain selagi itu memberikan dampak positif atau memberikan manfaat dalam menjalankan program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan program Kampung KB tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi. Kampung KB sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya yang telah disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Adanya partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB akan memenuhi kebutuhan

masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor, mensejahterakan masyarakat dan membangun masyarakat berbasis keluarga.

Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Kemudian partisipasi juga dilaksanakan dengan membentuk suatu struktur organisasi yang bertujuan untuk menyukses suatu program (Jalal, 2001:202). Artinya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program dapat dilihat dari upaya koordinasi yang dilakukan.

c. Program Kepesertaan Kegiatan

Kepesertaan kegiatan yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menjadi peserta dalam kegiatan yang dilaksanakan pada program Kampung KB Desa Tapung Makmur.

Ada beberapa kegiatan yang masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program Kampung KB, yaitu pertemuan berkala kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), menghadiri forum musyawarah, atau kegiatan lintas sektor yang dilaksanakan di Kampung KB.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berasal dari aparaturnya pelaksana dan peserta program Kampung KB Desa Tapung Makmur yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator Program Kepesertaan Kegiatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.12: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Mengenai Indikator Program Kepesertaan Kegiatan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Manfaat Kegiatan	40 (80%)	6 (12%)	4 (8%)	50
2	Sasaran Kegiatan	40 (80%)	6 (12%)	4 (8%)	50
	Jumlah	80	12	8	150
	Rata-rata	40	6	4	50
	Persentasi	80%	12%	8%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel V.12 bahwa tanggapan responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB mengenai indikator Kontribusi Sumberdaya berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini disebabkan dari jumlah responden 50 orang 40 responden memberikan jawaban bahwa indikator kontribusi sumberdaya terlaksana, 6 responden menjawab indikator kontribusi sumberdaya cukup terlaksana dan hanya 4 responden yang menjawab indikator kontribusi sumberdaya tidak terlaksana.

Item yang dinilai dari indikator dalam kontribusi sumberdaya seperti manfaat kegiatan dan sasaran kegiatan. Dari jawaban responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB yang menjawab Terlaksana, dikarenakan partisipasi masyarakat akan menentukan suatu program tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sebab program Kampung KB Desa Tapung Makmur dijalankan berdasarkan asas manfaat dan sasaran dari kegiatan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokja Program Kampung KB Desa Tapung Makmur yakni Ibu Yumarna dengan pertanyaan apakah program kepesertaan kegiatan dalam pelaksanaan program Kampung KB melibatkan partisipasi masyarakat ?. Beliau Menjawab:

“Kampung KB ini tidak hanya sebatas KB saja, akan tetapi ada namanya penyuluhan kita meng-advokasi. Ada BKB mengajak untuk mengetahui perkembangan anak secara optimal. Ada juga BKL yaitu Ibu yang punya lansia atau lansia itu sendiri untuk memelihara kesehatan. Ada BKR ini ibuyang memiliki remaja penyuluhan tentang narkoba, pendewasaan usia perkawinan, reproduksi. Terus ada juga namanya kelompok UPPKS dikumpulkan untuk mengembangkan usahanya juga tujuannya semua itu untuk menarik mereka sebagai akseptor intinya begitu, jadi semua kelompok yang ada di Kampung KB itu tujuannya untuk menjadi kan mereka sebagai peserta KB.” (Wawancara : Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB dapat dilihat dari bagaimana masyarakat ikut menjadi peserta dan ikut hadir dalam kelompok kegiatan Tri Bina yaitu BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia) dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang dilakukan secara berkala setiap satu kali satu bulan. Semua kelompok kegiatan dari program Kampung KB tersebut tujuan utamanya yaitu untuk mengajak masyarakat manjadi peserta KB.

Sementara itu wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bendahara Pokja program Kampung KB yaitu Ibu Endah Lestari. Wawancara dilakukan untuk mengetahui mengenai indikator program kepesertaan kegiatan dengan pertanyaan bagaimanakah program kepesertaan kegiatan dalam pelaksanaan program kampung KB Desa Tapung Makmur ? Beliau menjawab :

“Terkadang ada juga dari instansi terkait untuk memberdayakan masyarakat disini, seperti ada Bulo (Badan Usaha Lorong), bagaimana kita memanfaatkan pekarangan itu bisa bermanfaat bagi keluarga, menanam apakah. Kemarin itu ada produksi cabenya, ada juga pernah dari peternakan ada yang di kasih puyuh untuk memberdayakan, meningkatkan ekonomi”. (Wawancara : Jum’at tanggal 18 Februari 2022, pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa untuk kegiatan lintas sektor, masyarakat berpartisipasi dengan ikut menjadi peserta dalam kegiatan Badan Usaha Lorong (Bulo) yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan yang memberikan bibit tanaman untuk membantu masyarakat dalam perekonomian.

Sementara itu wawancara selanjutnya dilakukan dengan salah satu peserta program Kampung KB yaitu Ibu Tri Ayu Wulandari yang merupakan peserta Bina Keluarga Balita dan berasal dari Dusun IV Desa Tapung Makmur. Wawancara dilakukan untuk mengetahui mengenai indikator program kepesertaan kegiatan dengan pertanyaan apakah program kampung KB dalam kegiatannya dilakukan berdasarkan partisipasi masyarakat ? Beliau menjawab :

“Meskipun saya menjual-jual, alhamdulillah saya diberikan bantuan diberikan tempat-tempat jualan karena masuk di kelompok UPPKS. Jadi kami pernah diberi bantuan untuk usaha-usaha kami. Kami juga pernah di kasi arahan-arahan tentang bagaimana supaya bisa laku jualan saya, tapi akhir-akhir ini tidak pernah lagi”. (Wawancara : Minggu tanggal 20 Februari 2022, pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjadi peserta dari kelompok kegiatan UPPKS membantu mereka dalam usaha yang ditekuninya. Kegiatan advokasi dalam UPPKS kurang baik dikarenakan tidak teraturnya pertemuan yang dilakukan. Kebanyakan kegiatan advokasi hanya berfokus pada kegiatan kelompok Tri Bina.

Pelaksanaan UPPKS dilakukan juga hanya berlaku pada masyarakat yang sudah memiliki usaha sehingga masyarakat yang baru ingin melakukan usaha tidak termasuk dalam program UPPKS. Hal ini harus menjadi pertimbangan dari pemerintah bahwa untuk kelompok kegiatan UPPKS dapat menyentuh berbagai kalangan masyarakat demi membangun jiwa wirausaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dengan pemberian advokasi, pelatihan, dan bantuan dari pemerintah dapat membantu masyarakat dalam perekonomian.

Sementara itu, pernyataan juga diberikan oleh Sekretaris Pokja Kampung KB Desa Tapung Makmur yaitu Ibu Fransiska Zulaika. Beliau memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Setiap satu kali sebulan itu biasanya kita adakan posyandu, seperti biasa ya masyarakat yang memiliki balita datang untuk ditimbang anaknya. Partisipasi masyarakat disini sangat aktif karena banyak Ibu-Ibu yang hadir untuk kegiatan posyandu ini. Jadi Ibu-Ibu yang ikut dalam kelompok BKB hadir kalau ada posyandu ini”. (Wawancara : Kamis tanggal 17 Februari 2022, pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan lintas sektor dalam hal ini posyandu begitu antusias, hal ini dikarenakan masyarakat ingin memberikan yang terbaik untuk perkembangan balita mereka. Juga dengan adanya kelompok BKB masyarakat mendapatkan penyuluhan mengenai perkembangan anak. Kegiatan posyandu ini dilakukan rutin setiap satu kali sebulan yang dilakukan di lapangan yang terdapat di Desa Tapung Makmur. Partisipasi masyarakat dapat dilihat ketika menjadi bagian dari kegiatan posyandu tersebut dengan memberikan imunisasi pada anak balita mereka dan memeriksa kesehatan balitanya. Kegiatan ini merupakan hal yang sangat memberikan manfaat bagi masyarakat demi kesehatan balita mereka.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal menjadi peserta dalam setiap program maupun kegiatan ditunjukkan dalam bentuk ikut dalam kelompok Tri Bina dan UPPKS maupun program lintas sektor lainnya.

Partisipasi dalam pelaksanaan berupa kegiatan yang dilaksanakan tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program (Soetrisno, 1995:43).

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang aktif. Kegiatan yang dilakukan di Kampung KB tujuan utamanya yaitu mengajak masyarakat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menjadi akseptor KB dan juga mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

Dengan adanya upaya dari PLKB dan bantuandari kader KB dan pengurus Pokja Kampung KB yang senantiasa mengencarkan KB melalui advokasi kepada masyarakat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di Kampung KB untuk melaksanakan pembangunan yang dimulai dari keluarga yang tidak hanya dapat dari segi kesehatan tetapi juga sosial, ekonomi dan lainnya.

Adapun data pencapaian peserta KB aktif di Desa Tapung Makmur tahun 2021, datanya akan ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.13: Data Pencapaian Peserta KB aktif di Desa Tapung Makmur tahun 2021

No	Dusun	PUS	Bulan									
			Jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli	agst	Sep t	okt
1.	I	64	45	45	46	46	46	46	47	47	48	49
2.	II	79	51	51	52	52	52	51	52	52	53	53
3.	III	133	93	94	95	95	96	98	99	100	101	102
4.	IV	114	68	68	70	71	72	73	73	74	75	76
Desa		390	257	258	363	365	367	372	375	377	381	384

Sumber : Data Desa Tapung Makmur tahun 2021

Tabel V.13 di atas menunjukkan bahwa pencapaian peserta KB di Desa Tapung Makmur memiliki jumlah peserta KB sebanyak 384 orang sampai bulan Oktober 2021. Peserta KB Desa Tapung Makmur hampir setiap bulannya mengalami penambahan peserta KB. Namun, peningkatan peserta KB Desa Tapung Makmur saat ini terlihat belum signifikan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum memiliki waktu untuk berkonsultasi kepada PLKB maupun kader KB karena kesibukan masing-masing.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil dan Evaluasi

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dapat dilihat dari dua macam manfaat yaitu sosial dan pribadi. Manfaat sosial pada dasarnya adalah barang publik. Manfaat ini biasanya dicirikan sebagai layanan atau fasilitas seperti sekolah, klinik kesehatan dan jalan yang baik. Manfaat pribadi bukan berarti manfaat secara individu, keuntungan pribadi dalam hal ini seperti kepada anggota kelompok atau sektor karena ini memperoleh kekuatan sosial dan politik yang lebih banyak melalui pengoperasian proyek.

Partisipasi dalam evaluasi yaitu masyarakat ikut serta dalam mengevaluasi program Kampung KB untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya guna perbaikan maupun penambahan pelaksanaan program selanjutnya. Evaluasi memiliki peranan penting dalam keberhasilan suatu pelaksanaan program, dengan evaluasi akan mengetahui hal-hal yang dapat menunjang dan hal-hal yang menghambat dari pelaksanaan suatu program.

Selanjutnya untuk mengetahui indikator partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur terdapat 3 item yang dinilai yaitu Manfaat Sosial dan Pribadi, Partisipasi Langsung dan Partisipasi Tidak Langsung.

a. Manfaat Sosial dan Pribadi

Dalam suatu program yang dijalankan oleh pemerintah, swasta ataupun swadaya masyarakat sudah barang tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika dalam implementasi suatu program melibatkan atau terdapat partisipasi masyarakat didalamnya, maka biasanya manfaatnya lebih dapat

dirasakan sebab perencanaan program tersebut sering berdasarkan atas kemauan atau kebutuhan dari masyarakat.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berasal dari aparaturnya pelaksana dan peserta program Kampung KB Desa Tapung Makmur yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator Manfaat Sosial dan Pribadi. Dalam indikator manfaat sosial dan pribadi terdapat dua item yang dinilai yakni fasilitas dan keuntungan pribadi. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.14: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Mengenai Indikator Manfaat Sosial dan Pribadi

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Fasilitas	10 (20%)	35 (70%)	5 (10%)	50
2	Keuntungan Pribadi	10 (20%)	35 (70%)	5 (10%)	50
	Jumlah	20	70	10	100
	Rata-rata	10	35	5	50
	Persentasi	20%	70%	10%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel V.14 bahwa tanggapan responden aparaturnya pelaksana dan peserta program Kampung KB mengenai indikator manfaat sosial dan pribadi berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini disebabkan dari jumlah responden 50 orang, 35 responden memberikan jawaban bahwa indikator manfaat sosial dan pribadi cukup terlaksana, 10 responden menjawab indikator manfaat sosial dan pribadi terlaksana dan hanya 5 responden yang menjawab indikator manfaat sosial dan pribadi tidak terlaksana.

Item yang dinilai dari indikator dalam manfaat sosial dan pribadi seperti fasilitas dan keuntungan pribadi. Dari jawaban responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB yang menjawab Cukup Terlaksana, dikarenakan dalam pemanfaatan hasil program Kampung KB menghasilkan fasilitas untuk mendukung program tersebut. Serta sedikit memberikan keuntungan pribadi kepada para peserta program Kampung KB di Desa Tapung Makmur. Namun secara keseluruhan manfaat dari program Kampung KB tidak semuanya dirasakan oleh peserta program, sebab kenaikan jumlah peserta program Kampung KB belum meningkat secara signifikan. Padahal jika manfaat sosial dan pribadi dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Tapung Makmur, maka tentu jumlah peserta dari Program Kampung KB akan meningkat secara signifikan setiap tahunnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tapung Hilir selaku Pelindung Program Kampung KB yakni Bapak Hadinur Rahman mengenai indikator manfaat sosial dan pribadi dengan pertanyaan apakah terdapat manfaat sosial dan pribadi dari program Kampung KB Desa Tapung Makmur ?. Beliau menjawab:

“Kalau mengenai manfaat sudah jelas akan dirasakan oleh masyarakat yang menjadi peserta program kampung KB. Namun manfaat disini bukan berarti mendapatkan materi secara langsung atau peningkatan ekonomi dari program kami. Namun manfaat disini adalah agar masyarakat dapat meraih tujuan berkeluarga dan menjadikan rumah tangga yang sehat dan bahagia. Kami menambah fasilitas untuk para bayi seperti posyandu, fasilitas untuk BKR dan BKL, yang ke semuanya merupakan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat baik sosial maupun pribadi. (Wawancara : Senin tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa masyarakat tidak secara langsung dapat merasakan manfaat dari program Kampung KB. Akan tetapi perlu untuk mengikuti program terlebih dahulu, dan manfaatnya akan dirasakan di masa-masa yang akan datang. Namun pengadaan fasilitas dapat langsung dirasakan masyarakat secara sosial dan pribadi.

Manfaat Sosial dan Pribadi dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi program Kampung KB dapat dirasakan, walaupun tidak semua manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung atau praktis. Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Ibu Yumarna selaku ketua pokja kampung KB Tapung Makmur, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Tentu saja kami berharap dengan diadakannya program Kampung KB di Desa kita dapat memberikan manfaat kepada masyarakat baik sosial maupun pribadi. Terutama untuk masyarakat yang ikut atau berpartisipasi dalam menyukseskan program Kampung KB. Fasilitas yang tersedia memberikan manfaat kepada para ibu dan bayinya, dan keuntungannya adalah bahwa anak-anak dapat menerima vitamin dan imunisasi yang akan berpengaruh baik untuk tumbuh kembang anak (Wawancara : Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya program Kampung KB walaupun mungkin bukan manfaat secara langsung. Hal ini disebabkan tujuan dari Program Kampung KB itu sendiri adalah tujuan jangka panjang, agar menghasilkan kehidupan keluarga yang sehat dan bahagia.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pemanfaatan hasil dari suatu program diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat atau sebagai sasaran dari manfaat suatu program. Namun manfaat disini berupa fasilitas yang dapat dirasakan oleh

masyarakat lewat pelayanan yang dilakukan oleh para pegawai atau aparatur yang menjalankan program Kampung KB di Desa Tapung Makmur.

Merupakan wujud dari peran masyarakat dalam keikutsertaan berpartisipasi didesanya. Apakah keikutsertaannya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat tersebut dapat berupa mengikuti kegiatan dalam memelihara kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, ikut serta dalam kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan memelihara keamanan lingkungan secara suka rela, dan juga mengikuti kegiatan yang diadakan desa seperti kelompok usaha dibidang ekonomi (Mulyadi, 2009:49).

b. Partisipasi Langsung

Partisipasi langsung dalam evaluasi yaitu partisipasi yang secara langsung terlibat dalam mengevaluasi program Kampung KB. Evaluasi ini perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi program serta anggarannya dilaporkan secara rutin.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berasal dari aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB Desa Tapung Makmur yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator Partisipasi Langsung. Dalam indikator partisipasi langsung terdapat dua item yang dinilai yakni masyarakat lokal dan pemimpin lokal. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.15: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Mengenai Indikator Partisipasi Langsung

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Masyarakat Lokal	5 (10%)	10 (20%)	35 (70%)	50
2	Pemimpin Lokal	5 (10%)	10 (20%)	35 (70%)	50
	Jumlah	10	20	70	100
	Rata-rata	5	10	35	50
	Persentasi	10%	20%	70%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel V.15 bahwa tanggapan responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB mengenai indikator Partisipasi Langsung berada pada kategori “Tidak Terlaksana”. Hal ini disebabkan dari jumlah responden 50 orang 35 responden memberikan jawaban bahwa indikator partisipasi langsung tidak terlaksana, 10 responden menjawab indikator partisipasi langsung cukup terlaksana dan hanya 5 responden yang menjawab indikator partisipasi langsung terlaksana.

Item yang dinilai dari indikator dalam partisipasi langsung seperti masyarakat lokal dan pemimpin lokal. Dari jawaban responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB yang menjawab Tidak Terlaksana, dikarenakan dalam mengevaluasi pelaksanaan program Kampung KB merupakan kewenangan pihak yang di atasnya dalam hal ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar. Masyarakat lokal dan pemimpin dalam yang terdapat pada desa yang menyelenggarakan program kampung KB memang tidak

mempunyai ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tapung Hilir selaku Pelindung Program Kampung KB yakni Bapak Hadinur Rahman mengenai indikator Partisipasi Langsung dengan pertanyaan apakah terdapat partisipasi masyarakat dalam evaluasi program Kampung KB Desa Tapung Makmur ?.

Beliau Menjawab:

“Masyarakat pada umumnya itu tidak dilibatkan, karena baik dari Dnas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak maupun dari masing-masing dinas terkait yang telah melakukan program kegiatan di Kampung KB yang berhak mengevaluasi. Tapi kalau pelaporan tentang perkembangan program itu memang dilakukan oleh ketua Kampung KB (Wawancara : Senin tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa masyarakat tidak secara langsung dapat berpartisipasi dalam evaluasi karena hanya dapat dilakukan oleh dinas terkait dalam melakukan evaluasi. Namun dalam hal pelaporan, ketua Kampung KB akan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi dari suatu program di Kampung KB. Tujuan evaluasi untuk mendapatkan suatu gambaran tentang hasil dan manfaat yang berkaitan dengan program.

Partisipasi langsung masyarakat dalam mengevaluasi program Kampung KB sulit dilakukan, karena berkenaan dengan wewenang yang dimiliki oleh instansi terkait . Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Ibu Yumarna selaku ketua pokja kampung KB Tapung Makmur, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Hmm.. kalau evaluasi sih tidak ada dek dilibatkan masyarakat. Karena kan evaluasi menggunakan metode-metode tertentu. Beda dengan kalau seperti pemberian informasi bilang ini program sudah berjalan, ini belum atau kah ada yang masih kurang jadi hanya sebatas itu saja (Wawancara : Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi program. Namun dapat berpartisipasi dalam melaporkan kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang mengimplementasikan suatu kebijakan yang melibatkan sekelompok orang untuk pengambilan keputusan. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencapaian tujuan dari suatu program yang telah dilaksanakan. Hasil dari suatu evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut ataupun untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya.

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya (Sundariningrum, 2001:67).

Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan program, apabila tujuan belum terlaksana maka evaluator akan mencari tahu dimana letak kekurangan dari program tersebut. Indikator dari evaluasi program merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui apakah program tersebut telah

berhasil ataupun belum. Program Kampung KB Desa Tapung Makmur dalam hal evaluasi dengan partisipasi langsung tidak dilibatkan. Hal ini dikarenakan evaluator program merupakan orang yang memiliki kompetensi yang dipercaya oleh instansi untuk melakukan evaluasi.

c. **Partisipasi Tidak Langsung**

Evaluasi dapat dilakukan melalui partisipasi tidak langsung yaitu masyarakat berpartisipasi dalam hal memberikan informasi agar pemerintah mendapatkan gambaran tentang hasil dan manfaat serta perkembangan kegiatan yang dilakukan di Kampung KB.

Partisipasi tidak langsung dalam mengevaluasi program Kampung KB dapat dilakukan melalui pendapat tokoh dan pendapat masyarakat. Masyarakat memberikan penilaian ataupun pendapat tentang suatu program kegiatan yang dilakukan dalam Kampung KB. Masyarakat melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana program-program di Kampung KB terlaksana. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB melibatkan masyarakat dalam hal evaluasi melalui partisipasi tidak langsung untuk menilai bagaimana pencapaian suatu program Kampung KB. Kemudian pemimpin lokal dapat meminta ketua Pokja Kampung KB untuk menyampaikan laporan kegiatan dan realisasi program kepada masyarakat banyak. Tokoh masyarakat dapat memberikan nasehat terhadap pelaksana program Kampung KB agar sesuai dengan nilai-nilai masyarakat lokal.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berasal dari aparaturnya pelaksana dan peserta program Kampung KB Desa Tapung Makmur yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator Partisipasi Tidak

Langsung dalam mengevaluasi program Kampung KB dengan item yang dinilai adalah Pendapat Masyarakat dan Pendapat Tokoh Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.16: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pelaksana dan Peserta Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Mengenai Indikator Partisipasi Tidak Langsung Dalam Mengevaluasi Program Kampung KB

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pendapat Masyarakat	34 (68%)	10 (20%)	6 (12%)	50
2	Pendapat Tokoh	34 (68%)	10 (20%)	6 (12%)	50
	Jumlah	68	20	12	100
	Rata-rata	34	10	6	50
	Persentasi	68%	20%	12%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel V.16 bahwa tanggapan responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung KB mengenai indikator partisipasi tidak langsung dalam mengevaluasi program Kampung KB berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini disebabkan dari jumlah responden 50 orang 34 responden memberikan jawaban bahwa indikator partisipasi tidak langsung dalam mengevaluasi program Kampung KB terlaksana, 10 responden menjawab indikator partisipasi tidak langsung dalam mengevaluasi program Kampung KB cukup terlaksana dan hanya 6 responden yang menjawab indikator partisipasi tidak langsung dalam mengevaluasi program Kampung KB tidak terlaksana.

Item yang dinilai dari indikator dalam partisipasi tidak langsung dalam mengevaluasi program Kampung KB seperti pendapat masyarakat dan pendapat tokoh. Dari jawaban responden aparatur pelaksana dan peserta program Kampung

KB yang menjawab Terlaksana, dikarenakan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam melakukan evaluasi terhadap program Kampung KB secara tidak langsung.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokja Program Kampung KB yakni Ibu Yumarna mengenai indikator partisipasi tidak langsung dalam mengevaluasi program Kampung KB dengan pertanyaan apakah terdapat partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi program Kampung KB ?. Beliau Menjawab:

“Masyarakat dapat berpartisipasi dalam evaluasi melalui kegiatan forum musyawarah atau rapat pokja Kampung KB. Mereka dapat menyampaikan apa saja hal-hal yang selama ini program yang mesti di tingkatkan atau apasaja yang kurang selama kegiatan Kampung KB ini”. (Wawancara : Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa untuk bentuk partisipasi dalam hal evaluasi dapat dilakukan melalui pemberian penilaian ataupun pendapat tentang suatu program kegiatan yang dilakukan dalam Kampung KB. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Desa Tapung Makmur selaku Pembina Program Kampung KB yakni Bapak Amas Ramadan Sitompul, yang mengatakan bahwa :

“Evaluasi itu kan dilakukan untuk melihat bagaimana program-program telah terlaksana. Jadi mengenai partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini tentu dilibatkan namun tidak dengan secara langsung, seperti menilai program atau menilai penyuluh itu dilakukan kalau ada seperti loka karya atau forum musyawarah Kampung KB”. (Wawancara : Selasa tanggal 15 Februari 2022, pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa dengan menilai suatu pencapaian program dapat dilakukan melalui loka karya atau forum musyawarah. Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat secara tidak langsung ikut dalam

mengevaluasi kegiatan dari program Kampung KB. Sementara itu, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu peserta Bina Keluarga Remaja yakni Ibu Reni Ermawati yang merupakan warga Dusun I Desa Tapung Makmur. Beliau mengatakan bahwa :

“Kalau memberikan pendapat tentang perkembangan program Kampung KB, yaa kami ikut berpartisipasi dan disampaikan kalau ada rapat pokja atau forum musyawarah.” (Wawancara : Senin tanggal 21 Februari 2022, pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB harus melibatkan masyarakat dalam hal evaluasi melalui partisipasi tidak langsung untuk menilai bagaimana pencapaian suatu program Kampung KB.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi program Kampung KB masyarakat berpartisipasi secara tidak langsung dengan menilai program juga memberikan saran apa saja yang kurang dalam program Kampung KB. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan kegiatan program yang akan datang. Pelaksanaan program Kampung KB membutuhkan partisipasi masyarakat dari semua pihak terkait agar dapat menilai apa saja yang kurang dalam suatu program dan apa saja yang dapat dilakukan dan ditambah dari suatu program Kampung KB Desa Tapung Makmur.

Partisipasi tidak langsung terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya atau memberikan hak partisipasinya kepada orang lain (Siti Iriene, 2011:32). Masyarakat yang berpartisipasi secara tidak langsung dapat memberikan penilaian yang kemudian disampaikan oleh oranglain kepada pelaksana program Kampung KB sebagai bahan untuk evaluasi.

4. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Berdasarkan penjelasan berbagai indikator yang sudah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya disusun suatu rekapitulasi untuk melihat bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar secara keseluruhan yang dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel V.17: Distribusi Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

No	Indikator	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
			Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan	Keputusan Awal	0 (0%)	15 (30%)	35 (70%)	50 (100%)
		Keputusan Yang Sedang Berlangsung	24 (48%)	16 (32%)	10 (20%)	50 (100%)
		Keputusan Operasional	28 (56%)	12 (24%)	10 (20%)	50 (100%)
2	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan	Kontribusi Sumberdaya	40 (80%)	6 (12%)	4 (8%)	50 (100%)
		Upaya Administrasi dan Koordinasi	34 (68%)	10 (20%)	6 (12%)	50 (100%)
		Program Kepesertaan Kegiatan	40 (80%)	6 (12%)	4 (8%)	50 (100%)
3	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil dan Evaluasi	Manfaat Sosial dan Pribadi	10 (20%)	35 (70%)	5 (10%)	50 (100%)
		Partisipasi Langsung	5 (10%)	10 (20%)	35 (70%)	50 (100%)
		Partisipasi Tidak Langsung	34 (68%)	10 (20%)	6 (12%)	50 (100%)
Jumlah Rata-rata Presentase Kategori			215	120	115	450
			23	14	13	50
			(48%)	(27%)	(25%)	(100%)
Kategori			Terlaksana			

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Menarik kesimpulan rekapitulasi dari analisa hasil kuesioner, wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dikategorikan **Terlaksana**, itu artinya semua indikator dan sub indikator yang ada dinilai terlaksana baik mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi. Itu berarti program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar telah terlaksana sebagaimana mestinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Adapun Faktor penghambatnya yaitu:

1. Masyarakat sebagai kader tidak mau berpartisipasi dalam menjalankan program KB.

Dalam hal ini masyarakat sebagai target dan sasaran dari program Kampung KB di Desa Tapung Makmur belum berpartisipasi secara aktif untuk mengikuti program Kampung KB tersebut. Hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang keunggulan atau dampak positif yang akan dirasakan jika berpartisipasi aktif pada program tersebut. Sehingga walaupun telah dilakukan sosialisasi namun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah sehingga perlu digencarkan lagi sosialisasi dari pihak desa dan stakeholder terkait agar program Kampung KB dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang mengikutinya.

2. Kurangnya dukungan masyarakat dalam program ini dan masyarakat kurang menanggapi terhadap Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tapung Makmur.

Kesuksesan daripada Program Kampung KB sangat ditentukan oleh dari tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat yang mengikuti semua program yang ada. Hal ini berarti bahwa tingkat partisipasinya tinggi maka dapat dikatakan masyarakat mendukung program Kampung KB tersebut,

dan apabila partisipasinya rendah maka dapat dikatakan masyarakat kurang mendukung program tersebut.

3. Adanya tanggapan masyarakat yang berfikir bahwa program KB adalah program yang dilarang oleh agama, terutama agama islam. Mitos dimasyarakat yang beranggapan bahwa “banyak anak banyak rejeki”.

Kehidupan masyarakat di kampung yang masih sangat kental dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari ikut memberikan andil pada partipasi masyarakat yang cukup rendah di Kampung KB Desa Tapung Makmur. Padahal dapat dikatakan program Kampung KB tidaklah berlawanan dengan nilai-nilai agama yang ada. Hanya saja program Kampung KB tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki keturunan yang sehat, pintar dan cukup segala kebutuhannya. Tidaklah salah apabila seseorang memiliki banyak anak atau keturunan karena itu merupakan hak daripada seseorang itu, namun juga harus diperhatikan kemampuan daripada orangtua dalam membersarkan buah hatinya. Dimana kebutuhan dasar dari sang anak juga harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan itulah tujuan sebenarnya dari program Kampung KB dan bukan melarang seseorang untuk memiliki anak yang banyak.

4. Keluarga kader tidak mendukung terhadap keaktifan masyarakat sebagai kader BKR, BKL, BKB dalam wilayah Tapung Makmur.

Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai program BKR, BKL, dan BKB daripada keluarga yang ada di Desa Tapung Makmur. Pada program tersebut dibuat adalah untuk kebaikan dari

keluarga dalam masyarakat itu sendiri. Memang selama ini kebanyakan dari kader hanya berpartisipasi terhadap program Kampung KB karena terpaksa atau dipaksa, padahal sebenarnya mereka menganggap program tersebut adalah sia-sia atau tidak berguna. Padahal program tersebut sangat banyak memberikan manfaat kepada para kader apabila diikuti dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi yang terjadi justru dukung dari keluarga terhadap kader belum maksimal adanya atau bahkan menolak keluarganya untuk mengikuti program BKR, BKL dan BKB.

5. Tidak ada insentif buat masyarakat dan tidak adanya pendidikan masyarakat terhadap keaktifan kader dalam wilayah kerja BKR, BKL, BKB.

Selama ini belum diadakannya sosialisasi yang berfokus pada pendidikan kepada masyarakat untuk memperkenalkan tentang keunggulan dari pada program Kampung KB dan semua wilayah kerja dalam program Kampung KB tersebut. Sehingga belum bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program tersebut. Kemudian salah satu pemikiran yang masih cukup banyak dalam benak masyarakat desa adalah bahwa apabila pemerintah membuat suatu program maka masyarakat akan mendapatkan bayaran dari program tersebut. Bayaran disini bisa berbagai macam hal yang bermanfaat dan tidak harus dalam bentuk materi atau uang. Sehingga pihak penyelenggara program Kampung KB juga harus memikirkan tentang insentif yang akan diterima oleh masyarakat apabila mengikuti program Kampung KB.

6. Tidak aktifnya partisipasi masyarakat semakin rendah pula program KB di Tapung Makmur.

Partisipasi masyarakat yang aktif akan sangat menentukan kesuksesan terhadap semua program Kampung KB di Desa Tapung Makmur. Dimana partisipasi masyarakat tersebut merupakan faktor penentu dari berjalan dan suksesnya program KB di Desa Tapung Makmur. Oleh sebab itu harus diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti semua program pada Kampung KB di Desa Tapung Makmur. Sehingga baru bisa diselenggarakan program KB yang lebih memberikan dampak positif kepada semua masyarakat di Desa Tapung Makmur.

7. Masyarakat tidak memahami tentang tugas dan segala sesuatu terkait dengan program yang ada

Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Kampung KB harus melakukan tugas tertentu yang sesuai dengan tugas yang telah ditentukan oleh penyelenggara atau panitia program Kampung KB di Desa Tapung Makmur. Sehingga penjelasan mengenai tugas dan segala sesuatu yang terkait dengan semua program yang ada pada Program Kampung KB harus dijelaskan oleh penyelenggara kepada semua masyarakat sebagai kader atau objek yang mengikuti program Kampung KB.

8. Masyarakat tidak mengikuti perkembangan informasi yang ada di BKR, BKL, BKB di Tapung Makmur.

Perkembangan mengenai hasil program Kampung KB belum diberitahukan kepada semua peserta program BKR, BKL dan BKB di Desa Tapung Makmur. Hal ini merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengetahui sebesar apa dampak atau seberapa hasil yang didapatkan selama program Kampung KB di Desa Tapung Makmur dilakukan. Perkembangan informasi tersebut dibutuhkan masyarakat agar penyelenggaraan program Kampung KB di Desa Tapung Makmur lebih baik di masa mendatang.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, banyak yang peneliti temui berdasarkan tiga indikator yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan, dan Partisipasi Dalam Masyarakat Pemanfaatan Hasil Dan Evaluasi. Maka dari itu penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dapat dilihat dari tiga bentuk keputusan: Partisipasi masyarakat dalam Keputusan Awal tidak dilibatkan. Pengambilan keputusan yang sedang berlangsung, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk menghadiri forum musyawarah, rapat, atau penyuluhan dan dapat memberikan keluhan-keluhan maupun saran yang sebaiknya dilakukan untuk mensukseskan Kampung KB. Meskipun dalam suatu rapat atau forum musyawarah tersebut tidak maksimal karena sedikitnya masyarakat yang hadir karena kesibukan masing-masing. Pengambilan keputusan operasional, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk pemilihan pengurus Kampung KB yang disebut dengan Pokja Kampung KB. Keaktifan partisipasi masyarakat dalam pemilihan ketua dan jajaran pokja merupakan suatu hal yang sangat

penting agar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan, dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu Partisipasi masyarakat dalam kontribusi sumber daya berupa uang untuk kegiatan kebersihan lingkungan. Selain itu, juga dapat dilihat dari kontribusi masyarakat dalam hal peminjaman alat untuk kelancaran dari kegiatan di Kampung KB. Kontribusi juga di berikan oleh masyarakat dalam hal pemberian informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian peserta KB melalui kader KB. Partisipasi masyarakat dalam hal menjadi peserta dalam setiap program maupun kegiatan ditunjukkan dalam bentuk ikut dalam kelompok Tri Bina dan UPPKS maupun program lintas sektor lainnya. Kegiatan yang dilakukan di Kampung KB tujuan utamanya yaitu mengajak masyarakat untuk menjadi peserta KB.
3. Partisipasi Masyarakat dalam Dalam Pemanfaatan Hasil dan Evaluasi, yaitu Partisipasi langsung dalam evaluasi masyarakat belum dilibatkan. Namun, dalam hal pelaporan kegiatan dan realisasi program dilakukan oleh ketua Kampung KB. Evaluasi program Kampung KB masyarakat berpartisipasi secara tidak langsung dengan menilai program juga memberikan saran apa saja yang kurang dalam program Kampung KB. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan kegiatan program yang akan datang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan masalah-masalah yang ditemui saat melakukan penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yaitu :

1. Diharapkan kepada pemerintah, instansi terkait dan lintas sektor agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi permasalahan masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas masyarakat di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
2. Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Program Kampung KB agar masyarakat mempunyai rasa memiliki dan ikut andil dalam Program Kampung KB di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
3. Perlunya pelatihan keterampilan pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan memaksimalkan pertemuan agar masyarakat mampu membuat usaha untuk meningkatkan perekonomian.
4. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan program pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui ikut dalam Program Keluarga Berencana dan kelompok kegiatan di Kampung KB.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Marzali. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Arifin, Tahir. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Pustaka Indonesia Press.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hamijoyo. 2007. *Partisipasi Dalam Pembangunan*. Jakarta : Depdikbud.
- Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan, 2013. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika
- Hardiyansyah. 2017 . *Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Isbandi, Rukminto Adi.2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok : Rajawali Pers
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang:Bayumedia.
- Sholichin, Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siswanto. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanto, dan Juni Priansa, Doni.2014. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2019. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Tarmizi dan Hendry. 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Widodo, Teguh. 2015. *Pembangunan Endogen : Mengabaikan Peran Negara Dalam Pembangunan*. Yogyakarta : Deepublish.

Winardi. 2011. *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Pers

JURNAL

Andreeyan, Rizal. 2014. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. <http://ejournal.an.fisip-unmul.org/>. eJournal Administrasi Negara. Vol. 2, No. 4.

Anwar, Sakaria J. 2009. *Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Makassar. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 15, No. 3.

Arzaq, Mohammad Yassir dan Tauran. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif Di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik*. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11881>. eJournal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 3, No. 5.

Igrisia, Irawaty. 2008. *Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Makassar. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 14, No. 3.

Joko Adi Prasetyo, Anggaunitakiranantika. 2020. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera di Kampung KB*. <http://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/>

Kristiniati, Rahayu dan Choiriyah, Ilmi Usrotin. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo* Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 2, No. 2.

Paath, Stephanie Regina Setya Ningtyas. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Elektronik Rukun Tetangga Warga (e-RT/RW) Di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya*. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/3273/5536/>. eJournal Administrasi Negara. Vol. 1, No. 3.

Puspaningtyas, Niken Septihandini, Warsono, Hardi dan Marom, Aufarul. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Pedurungan*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/4362/>. eJournal of Public Policy and Management Review. Vol. 3, No. 1.

- Putri, Primadini. 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Kredit Mikro Nagari Melalui Pla Baitul Maal Wat Tamwil*. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/598>. eJournal Kebijakan Publik. Vol.1, No. 2.
- Relidiansyah. 2019. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir*. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/18871>
- Rifian Handi,Sujiantodan Zaili Rusli. 2020. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana*.<http://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/load/7934/6131&ved>. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol.16, No.1.

DOKUMEN

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2015. *Petunjuk Teknis Kampung KB : BKKBN*.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2017. *Pedoman Pengelolaan Kampung KB : BKKBN*.
- Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2021.
- Keputusan Bupati Kampar Nomor : 474-413/V/2017 Tentang Penetapan Desa Sebagai Wilayah Kampung Keluarga Berencana Tingkat Kabupaten Kampar Tahun 2017
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*.
- Republik Indonesia. *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota*.